



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Povinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 100.3.6/976/BAPPEDA-2.1/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Bahwa diinstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun RENSTRA Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Berakhirnya masa jabatan Gubernur Jambi periode tahun 2021-2026 menjadi titik tolak disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu periode tahun 2021-2026.

Konsekuensi logis dari tahapan perencanaan pembangunan daerah ini diikuti dengan berakhir pula masa berlaku RENSTRA Perangkat Daerah Periode Tahun 2021-2026 dilanjutkan dengan disusunnya dokumen RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029, dengan berpedoman kepada dokumen RPJMD periode tahun 2025-2029.

Sesuai sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sinkron dengan RPJMD serta RENSTRA Perangkat Daerah. RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi yang memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2029 yakni **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**

Dengan disusunnya RENSTRA ini, diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat lebih memaksimalkan pencapaian visi dan misi Provinsi Jambi serta kinerja, sehingga dapat mendukung tercapainya salah satu tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD yaitu **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender”**.

Semakin meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM), maka mengindikasikan semakin membaiknya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, dimana Rata-rata Lama Sekolah menjadi salah satu faktor penting yang sangat menentukan. Semoga dokumen perencanaan ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Jambi, khususnya untuk kemajuan dunia pendidikan di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang kita cintai ini.

Jambi, 10 Oktober 2025

Pt. Kepala Dinas,



M. Umar MY, S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19790628 200903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GRAFIK.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	40
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	41
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	42
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.2.2 Isu Strategis	46
2.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	58
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	60
3.2 Strategis dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	65

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN	74
4.1 Uraian Program	74
4.2 Uraian Kegiatan	76
4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator dan Pagu Indikatif ...	78
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah	189
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja (IKU) Perangkat Daerah	197
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	199
BAB V PENUTUP	203
5.1 Kesimpulan Substansial.....	203
5.2 Kaidah Pelaksanaan	204
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.....	205

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Aset/ Sarana Prasarana (gedung kantor) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	24
Tabel 2	Rekapitulasi Aset/ Sarana Prasarana (gedung sekolah) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.....	24
Tabel 3	Rekapitulasi Aset/ Kendaraan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.....	24
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Provinsi Jambi	32
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	38
Tabel 7	Tantangan Masalah Pembangunan Pendidikan Provinsi Jambi	44
Tabel 8	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	59
Tabel 9	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.....	63
Tabel 10	Penetapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	66
Tabel 11	Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	68
Tabel 12	Teknis Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	79
Tabel 13	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan	100
Tabel 14	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	190
Tabel 15	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/ Perlengkapan Peserta Didik	196
Tabel 16	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	197
Tabel 17	Indikator Kinerja Kunci, Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029	200

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2025	21
Grafik 2	Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025	21
Grafik 3	Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Fungsional Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025	22
Grafik 4	Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025	22
Grafik 5	Profil Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025	23
Grafik 6	Profil Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur Jambi periode tahun 2021-2026 merupakan titik tolak disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2025-2029. Konsekuensi logis dari tahapan perencanaan pembangunan daerah ini diikuti dengan berakhir pula masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 yang dilanjutkan dengan disusunnya dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi periode tahun 2025-2029, dengan berpedoman kepada dokumen Ranwal RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2025-2029 yang telah disusun.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 100.3.6/976/BAPPEDA-2.1/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi periode tahun 2025-2029 maka diinstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun Renstra dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penyusunan Renstra perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk Renstra Dinas Pendidikan namun pada tanggal 27 Maret 2025 telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan perpanjangan dari RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2025-2029, mengingat seluruh program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan implementasi pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Jambi dalam urusan pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama periode RPJMD yaitu kurun waktu Tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja kurun waktu Tahun 2025 – 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - f. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 - g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6363);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- s. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2025-2029;
- t. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
- z. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);
- aa. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 9).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud :

- a. Menjadi dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.
- b. Menjadi pedoman untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- c. Menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan Renstra ini adalah:

- a. Memberikan gambaran komprehensif keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Memberikan jaminan ketercapaian penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan sinergitas di antara semua pemangku kepentingan bidang Pendidikan di Provinsi Jambi.
- d. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang sinergis pada setiap tingkatan pemerintahan, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk tahun 2025-2029, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;

3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
4. Kelompok sasaran layanan;
5. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah; dan
6. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029;
2. Sasara Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target , dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan pemerintah daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

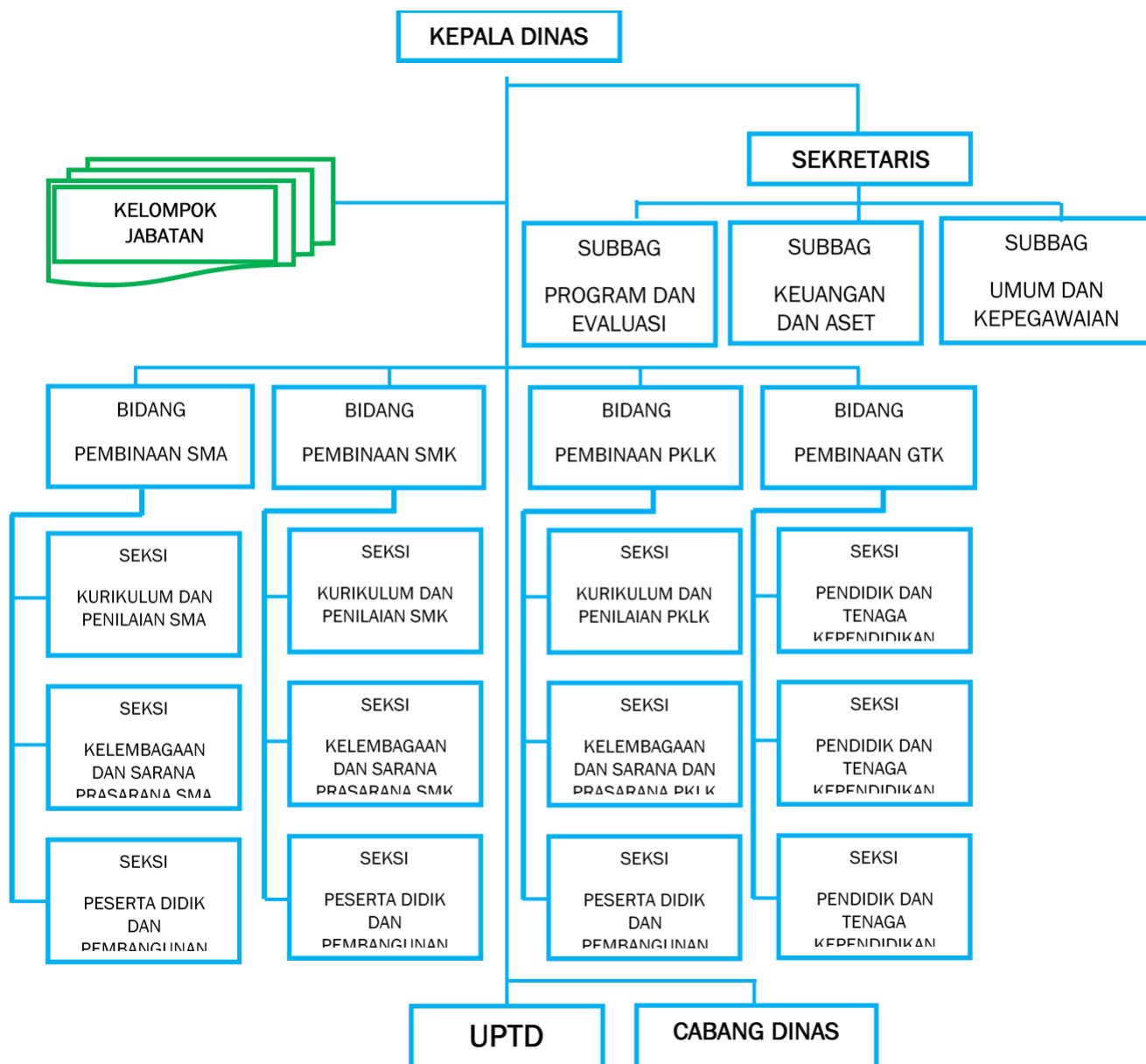
2.1.1. Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
4. Peningkatan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing,serta kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan;
5. Optimalisasi kapasitas sumberdaya aparatur baik Pendidik maupun tenaga kependidikan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI
 (Peraturan Gubernur Jambi, Nomor 35 Tahun 2016)



Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan

fungsi dinas. Adapun fungsi Sekretariat/ Bidang/ Balai dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan koordinasikan dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, hukum hubungan masyarakat, rumah tangga dinas dan barang milik daerah. Adapun fungsi dari sekretariat adalah :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sekretariat;
- b. penyiapan rancangan keputusan kepala dinas;
- c. pelaksanaan tugas yang berkenan dengan kepegawaian;
- d. penyusunan anggaran keuangan dan aset sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenan dengan keuangan;
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan barang, jasa dan pendistribusian;
- f. pelaksanaan urusan keprotokolan, kehumasan, dan rumah tangga dinas;
- g. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan dokumentasi;
- h. pembinaan dan penilaian kinerja staf;
- i. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan subbagian;
- j. pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan sekolah menengah atas meliputi peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, kesiswaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitasi kegiatan

yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun fungsi Bidang Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas (sma);
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas (sma);
- c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas (sma);
- d. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas (sma);
- e. Perencanaan operasional sekolah menengah atas (sma);
- f. Penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan Pengelolaan sekolah menengah atas (sma) sebagai pertanggungjawaban kepala dinas pendidikan kepada Gubernur;
- g. Pengelolaan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan sekolah menengah atas (sma) sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif;
- h. Pengelolaan perencanaan, penetapan perizinan pendirian dan penutupan sekolah menengah atas (sma);
- i. Pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik sekolah menengah atas (sma);
- j. Pengelolaan kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas (sma);
- k. Pengelolaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat satuan sekolah menengah atas (sma);
- l. Pengelolaan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas (sma);
- m. Pengelolaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan pembiayaan penjaminan mutu sekolah menengah atas (sma) sesuai kewenangannya;

- n. Pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum sekolah menengah atas (sma);
- o. Pengelolaan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan sekolah menengah atas (sma);
- p. pengelolaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah menengah atas (sma);
- q. Pengelolaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas (sma);
- r. Pengelolaan pengawasan penggunaan buku pelajaran sekolah menengah atas (sma);
- s. Pengelolaan, penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur sekolah menengah atas (sma);
- t. pengelolaan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah atas (sma);
- u. Pengelolaan, pengkoordinasian, pemfasilitasian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah menengah atas (sma) skala provinsi;
- v. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (sma);
- w. Pengelolaan pelaksanaan akreditasi sekolah menengah atas (sma);
- x. Pengelolaan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa satuan sekolah menengah atas (sma);
- y. Pengelolaan pemberian izin mutasi siswa sekolah menengah atas (sma);
- z. Penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
- aa.pembantuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
- bb.pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi;
- cc. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; dan
- dd.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Mempunyai tugas mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan Menengah kejuruan meliputi kegiatan, koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis kejuruan. pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengevaluasian, penilaian program pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Adapun fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan pengelolaan program kerja kegiatan bidang pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- b. pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum, dan pendidikan kesiswaan serta sarana dan prasarana;
- c. Pengkoorganisasian atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
- d. pengelolaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum pendidikan kesiswaan dan sarana prasarana;
- e. penetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan menengah kejuruan, yang cocok dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan perencanaan nasional. Dan provinsi;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan menengah bertaraf internasional/rintisan sekolah kejuruan bertaraf internasional, dan satuan pendidikan keunggulan lokal;
- g. pengevaluasian satuan pendidikan menengah kejuruan bertaraf internasional/rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah keunggulan lokal;
- h. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dan sekolah keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan;
- i. pengkoorganisasian, pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;

- j. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan;
- k. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
- m. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
- n. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
- o. pembantuan pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan menengah kejuruan;
- p. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan pendidikan menengah kejuruan;
- q. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah satuan pendidikan menengah kejuruan;
- r. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
- s. pembantuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan menengah kejuruan;
- t. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf. Bidang kejuruan;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kejuruan;
- v. pengkoorganisasian dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri;
- w. pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana;
- x. pengelolaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
- y. pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pada sekolah menengah kejuruan;

- z. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penPendidikan pendidikan menengah kejuruan; dan
- aa.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan tugas dalam bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan pendidikan khusus layanan khusus meliputi peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, kesiswaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitasi kegiatan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus layanan khusus;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus layanan khusus;
- c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan khusus layanan khusus;
- d. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan khusus layanan khusus;
- e. perencanaan operasional pendidikan khusus layanan khusus;
- f. penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan pengelolaan pendidikan khusus layanan khusus sebagai pertanggungjawaban kepala dinas pendidikan kepada gubernur;

- g. pengelolaan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan khusus layanan khusus sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif;
- h. pengelolaan perencanaan, penetapan perizinan pendirian dan penutupan pendidikan khusus layanan khusus;
- i. pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan khusus layanan khusus;
- j. pengelolaan kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan khusus layanan khusus;
- k. pengelolaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat satuan pendidikan khusus layanan khusus;
- l. pengelolaan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan pendidikan khusus layanan khusus;
- m. pengelolaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan pembiayaan penjaminan mutu pendidikan khusus layanan khusus sesuai kewenangannya;
- n. pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan khusus layanan khusus;
- o. pengelolaan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan khusus layanan khusus;
- p. pengelolaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan khusus layanan khusus;
- q. pengelolaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan khusus layanan khusus;
- r. pengelolaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan khusus layanan khusus;
- s. pengelolaan, penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan khusus layanan khusus;
- t. pengelolaan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan khusus layanan khusus;

- u. pengelolaan, pengkoordinasian, pemfasilitasian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian pendidikan khusus layanan khusus (PKLK) skala provinsi;
- v. pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tingkat pendidikan khusus layanan khusus;
- w. pengelolaan pelaksanaan akreditasi pendidikan khusus layanan khusus;
- x. pengelolaan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa satuan pendidikan khusus layanan khusus;
- y. pengelolaan pemberian izin mutasi siswa pendidikan khusus layanan khusus;
- z. penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karir;
- aa. pembantuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
- bb. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi;
- cc. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; dan
- dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pelaksanaan tugas bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun fungsi Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan/program dan kebijakan di bidang pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
- e. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja staf;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Pergub Nomor 33 tahun 2018, UPTD BTIKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran BTIKP;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- c. pengembangan dan pengelolaan jejaring dan e-Layanan pendidikan;
- d. pengembangan dan produksi teknologi pembelajaran berbasis multimedia serta produksi media pembelajaran;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan, pendayagunaan, pelatihan dan penelitian teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- f. pelaksanaan kegiatan pendataan pendidikan di Provinsi Jambi;
- g. pelaksanaan kegiatan publikasi pendidikan;
- h. pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan literasi berbasis TIK;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
- k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online;
- l. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Beasiswa online;

- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Cabang Dinas

- a. Pada dinas dapat dibentuk cabang dinas;
- b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi cabang dinas ditetapkan dalam peraturan gubernur;
- c. Sampai dengan saat ini masih blm terbentuk kantor Cabang Dinas Pendidikan yang akan di bentuk berjumlah 5 Kacabdin.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

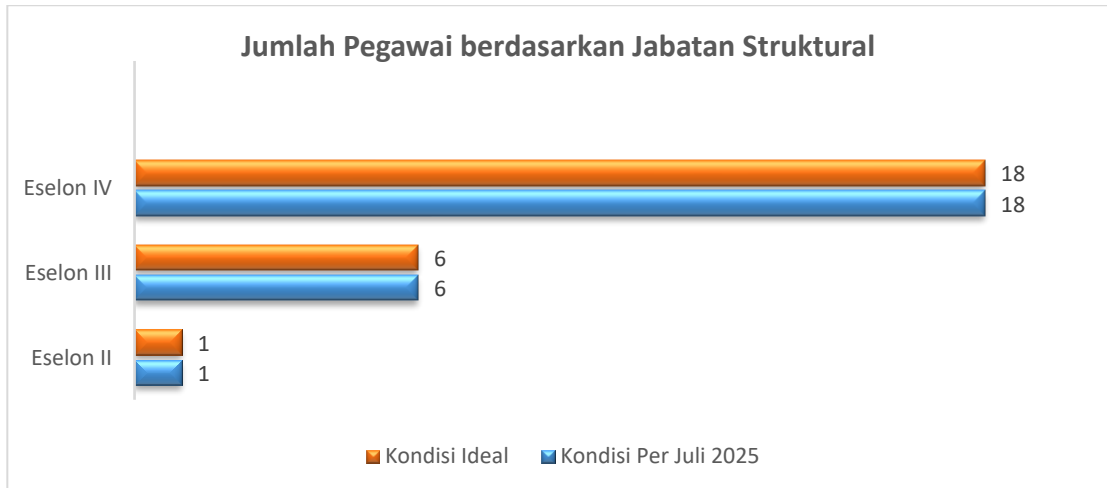
- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas;
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sampai 31 Juni 2025, tercatat sebanyak 124 pegawai yang terdiri 25 pejabat struktural, 3 pejabat fungsional tertentu dan 96 pejabat fungsional umum. Selain pegawai, tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 5.744 Guru SMA, 4.216 Guru SMK, 393 Guru SLB,

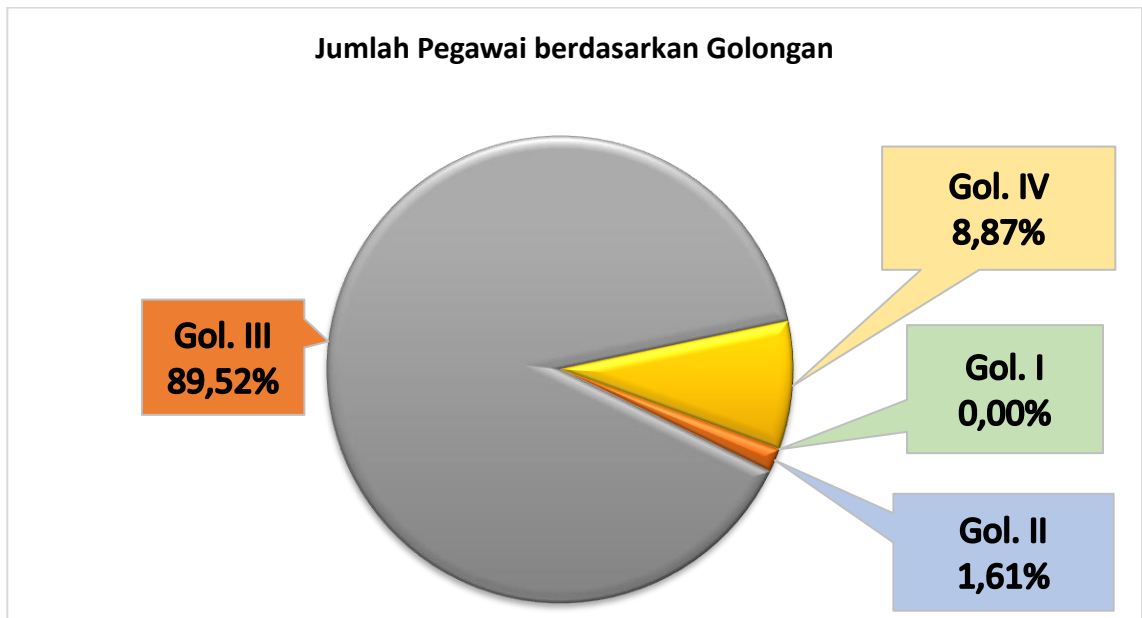
1.773 Tenaga Kependidikan SMA, 1.260 Tenaga Kependidikan SMK dan 140 Tenaga Kependidikan SLB. Untuk melihat profil kepegawaian, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi disajikan sebagai berikut :

Grafik 1 Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber Data : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

Grafik 2 Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

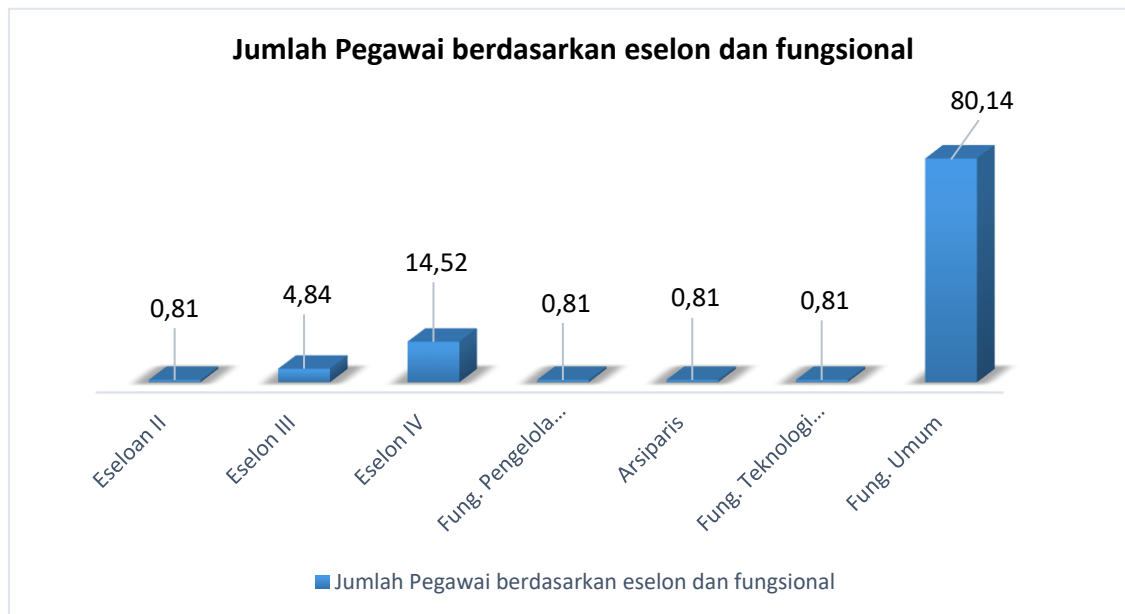


Sumber Data : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa tidak terdapat kesenjangan pemenuhan Jabatan Struktural di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagian besar

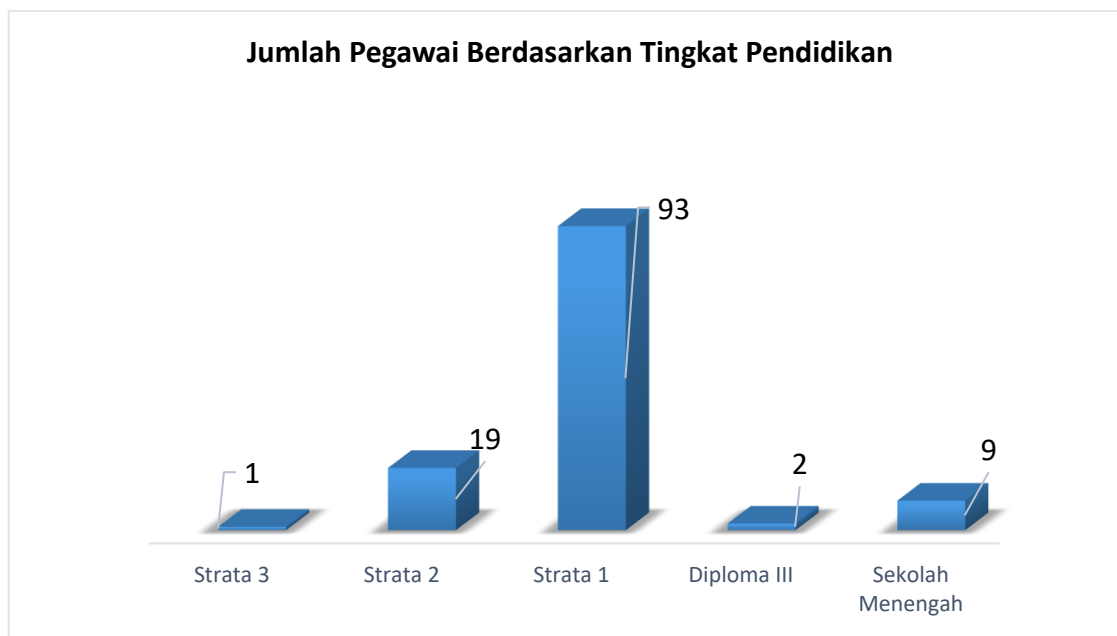
merupakan pegawai Golongan Tiga sebesar 89,50%, sedangkan 8,87% (Gol. IV) dan 1,61% (Gol. II).

Grafik 3 Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Fungsional Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025



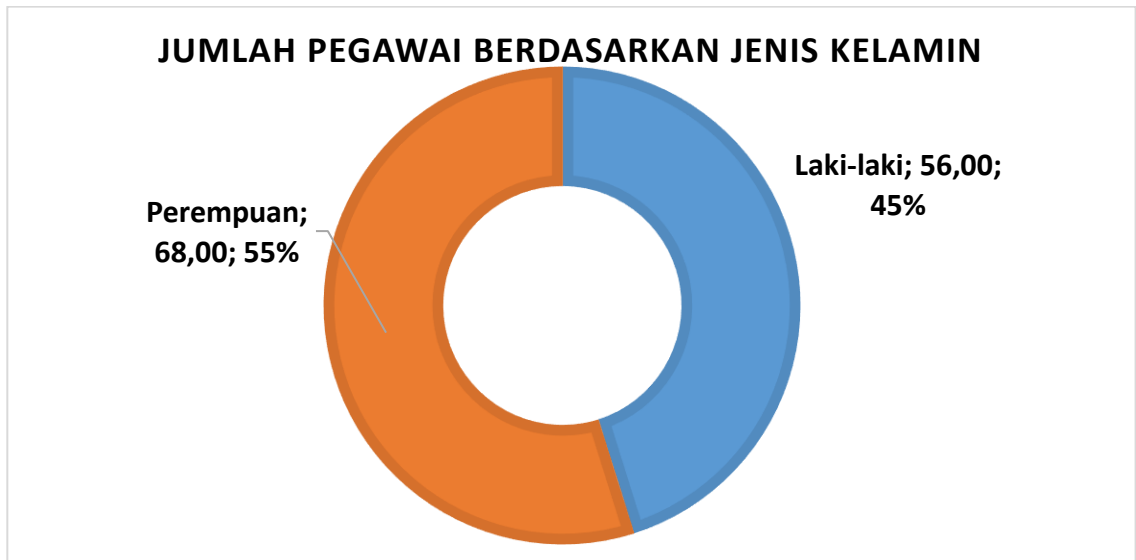
Sumber Data : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

Grafik 4 Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber Data : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

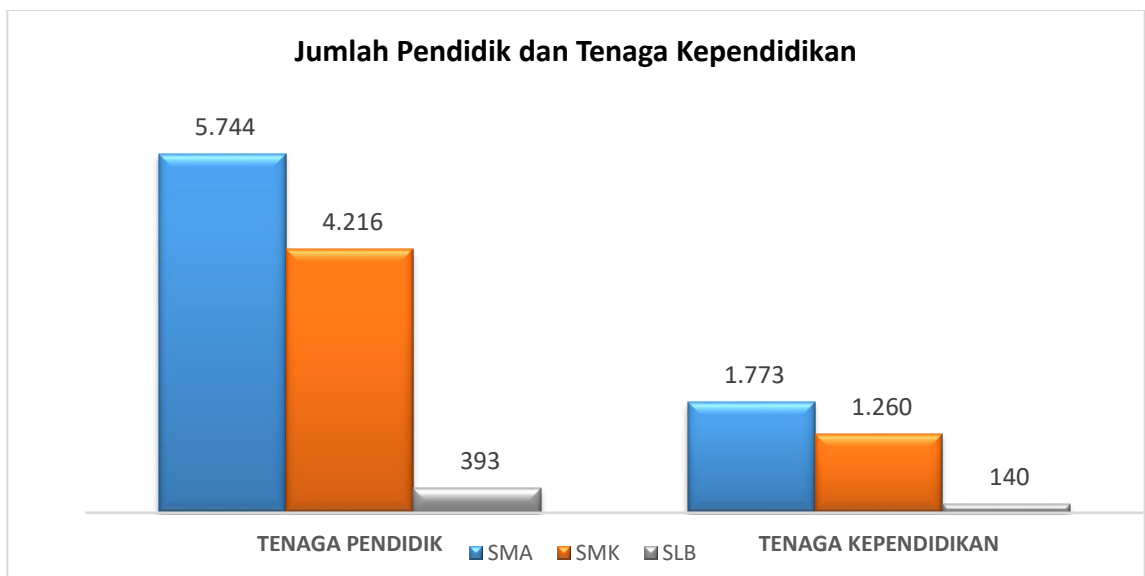
Grafik 5 Profil Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber Data : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum dan apabila dilihat dari tingkat pendidikan lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 sebanyak 91 orang sementara jumlah pegawai mencerminkan kesetaraan gender dimana jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki 45% dan perempuan 55% mendekati seimbang.

Grafik 6 Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber Data: Data Dapodik Kemendikdasmen 2025

Dari grafik 2.6 di atas dapat dilihat bahwa selain ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdapat Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (TU) yang tersebar di pada jenjang pendidikan SMA, SMK, SLB. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) seluruhnya berjumlah 10.353 orang dan Tenaga Kependidikan berjumlah 3.173 Orang.

Aset/ Sarana dan Prasarana

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan publik sektor pendidikan selain didukung oleh personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diuraikan di atas, didukung juga oleh fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional (merupakan aset daerah), sebagaimana daftar dibawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Aset/ Sarana Prasarana (gedung kantor) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Nama/ Jenis Barang	Letak/ Alamat	Penggunaan
1	Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Jl. A.Yani No.06 Telanaipura Jambi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2	Gedung UPTD BTKP	Jl. A.Yani No.06 Telanaipura Jambi	Kantor UPTD BTKP

Sumber Data : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

Tabel 2. Rekapitulasi Aset/ Sarana Prasarana (gedung sekolah) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	SMA Negeri	164
2	SMK Negeri	108
3	SLB Negeri	16
Total		288

Sumber Data : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

Tabel 3. Rekapitulasi Aset/ Kendaraan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pengguna
1	Roda 4 (empat)	1 unit	Pejabat Eselon II
		6 unit	Pejabat Eselon III
		1 unit	Koordinator Pengawas Sekolah
		2 unit	Operasional SMKN 3 Kota Jambi
		7 unit	Oprasional SMAN Titian Teras HAS
		2 unit	Operasional SMK PP Negeri Jambi
		9 unit	Operasional Dinas Pendidikan
2	Roda 2 (dua)	30 unit	Pejabat Eselon IV dan Staf
		96 unit	Pengawas Sekolah
Total		154 unit	

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2023 dan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2023-2024 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada kedua dokumen tersebut, IKU Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berbeda antara tahun 2021-2023 dan tahun 2024-2025, sebagaimana dijabarkan berikut ini :

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Tabel T-C.23.)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	APK SMA dan SMK			74,23%	76,17%				69,85%	71,54%				94,10	93,92			
2	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	-	-	30%	35%	-	-	-	84,95%	90%	-	-	-	283,17	257,14	-	-	-
3	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	-	-	59,2%	60,02%	-	-	-	41,43%	41,42	-	-	-	69,98	69,01	-	-	-
4	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	-	-	28,3%	29,2%	-	-	-	36,35%	35,83	-	-	-	128,45	122,71	-	-	-
5	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	-	-	35%	40%	-	-	-	44,5%	48%	-	-	-	127,14	120,00	-	-	-
6	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B	-	-	27%	29%	-	-	-	41,80%	43%	-	-	-	154,81	148,28	-	-	-
7	Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha	-	-	11%	12%	-	-	-	17%	17%	-	-	-	154,55	141,67	-	-	-
8	Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	-	-	100%	100%	-	-	-	47,87%	65,83	-	-	-	47,87	65,83	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Realisasi Capaian 2024	Target IKK 2025	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Pendidik Bahasa Indonesia	-	-	5%	10%	-	-	-	NA	NA	-	-	-	NA	NA	-	-	-
10	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	26,86%	27,86%	-	-	-	30,33%	-	-	-	-	112,92	0,00	-	-	-
11	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-
12	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelolah oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	82	82	-	-	-	89,03	84,44	-	-	-	108,57	102,98	-	-	-
14	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	-	-	70	71	-	-	-	72,7	72,95	-	-	-	103,86	102,75	-	-	-
No	Perubahan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 -18 Tahun	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	71,97%	-	-	-	-	71,97	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	59,78%	-	-	-	-	59,78	-	-
No	Perubahan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Realisasi Capaian 2024	Target IKK 2025	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	-	-	-	94%	-	-	-	-	81,6%	-	-	-	-	86,81	-	-
4	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	-	-	-	79,61%	-	-	-	-	74,48%	-	-	-	-	93,56	-	-
5	Skor Kemampuan Literasi SMA	-	-	-	-	67,49	-	-	-	-	70,1	-	-	-	-	103,87	-	-
6	Skor Kemampuan Numerasi SMA	-	-	-	-	57,48	-	-	-	-	60,05	-	-	-	-	104,47	-	-
7	Skor Kemampuan Literasi SMK	-	-	-	-	63,21	-	-	-	-	64,73	-	-	-	-	102,40	-	-
8	Skor Kemampuan Numerasi SMK	-	-	-	-	54,73	-	-	-	-	56,19	-	-	-	-	102,67	-	-
9	Skor Kemampuan Literasi SDLB	-	-	-	-	55,92	-	-	-	-	60,42	-	-	-	-	108,05	-	-
10	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	-	-	-	-	55,39	-	-	-	-	54,07	-	-	-	-	97,62	-	-
11	Skor Kemampuan Literasi SMPLB	-	-	-	-	57,13	-	-	-	-	55,53	-	-	-	-	97,20	-	-
12	Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	-	-	-	-	57,08	-	-	-	-	53,55	-	-	-	-	93,82	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Skor Kemampuan Literasi SMALB	-	-	-	-	58,4	-	-	-	-	57,69	-	-	-	-	98,78	-	-
14	Skor Kemampuan Numerasi SMALB	-	-	-	-	52,44	-	-	-	-	57,91	-	-	-	-	110,43	-	-
15	Iklim Keamanan SMA	-	-	-	-	78,85	-	-	-	-	70,95	-	-	-	-	89,98	-	-
16	Iklim Kebinekaan SMA	-	-	-	-	73,94	-	-	-	-	71,08	-	-	-	-	96,13	-	-
17	Iklim Inklusivitas SMA	-	-	-	-	61,94	-	-	-	-	58,85	-	-	-	-	95,01	-	-
18	Iklim Keamanan SMK	-	-	-	-	75,88	-	-	-	-	67,46	-	-	-	-	88,90	-	-
No	Perubahan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Realisasi Capaian 2024	Target IKK 2025	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Iklim Inklusivitas SMK	-	-	-	-	58,96	-	-	-	-	55,33	-	-	-	-	93,84	-	-
21	Iklim Keamanan SDLB	-	-	-	-	81,81	-	-	-	-	74,38	-	-	-	-	90,92	-	-
22	Iklim Kebinekaan SDLB	-	-	-	-	72,08	-	-	-	-	65,23	-	-	-	-	90,50	-	-
23	Iklim Inklusivitas SDLB	-	-	-	-	64,21	-	-	-	-	64,31	-	-	-	-	100,16	-	-
24	Iklim Keamanan SMPLB	-	-	-	-	81,7	-	-	-	-	64,08	-	-	-	-	78,43	-	-
25	Iklim KebinekaanSMPLB	-	-	-	-	68,29	-	-	-	-	66,62	-	-	-	-	97,55	-	-
26	Iklim Inklusivitas SMPLB	-	-	-	-	61,92	-	-	-	-	62,62	-	-	-	-	101,13	-	-
27	Iklim Keamanan SMALB	-	-	-	-	71,79	-	-	-	-	69,18	-	-	-	-	96,36	-	-
28	Iklim KebinekaanSMALB	-	-	-	-	67,37	-	-	-	-	66,62	-	-	-	-	98,89	-	-
29	Iklim Inklusivitas SMALB	-	-	-	-	65,43	-	-	-	-	63,18	-	-	-	-	96,56	-	-
30	Persentase Pendidik ASN memenuhi standar jumlah	-	-	-	-	66,9%	-	-	-	-	71,33%	-	-	-	-	106,62	-	-
31	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	87,83%	-	-	-	-	88,85%	-	-	-	-	101,16	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	memenuhi standar kualitas																	
32	Persentase Satuan Pendidikan Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	51,10%	-	-	-	-	85,17	-	-
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	85	-	-	-	-	92,92	-	-	-	-	109,32	-	-
34	Predikat Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	74	-	-	-	-	72,95	-	-	-	-	98,58	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel 4 diatas terdapat 2 (dua) periode tahun perencanaan yang telah terlaksana yaitu priode tahun 2022-2023 dan 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Jambi dalam rangka:

- a. Mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan, serta sinergitas dengan capaian program pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Mempertimbangkan perubahan ketentuan dimaksud, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026. Pada periode tahun 2022-2023 terdapat 14 indikator yang menjadi tanda-tanda keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari keseluruhan indikator tersebut belum mencapai hasil yang memuaskan terutama indikator yang merupakan indikator yang merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) diantaranya :

- a. Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
- b. Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
- c. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha.

Senada dengan indikator SPM diatas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 Indikator SPM tentang penerapan SPM yang merupakan petunjuk umum begitu juga menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Keputusan Menteri tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal yang merupakan petunjuk teknis kementerian/ lembaga berkolaborasi menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 16 : ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dan berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga.

Sehubungan dengan amanat penerapan SPM tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi dalam kesempatannya telah melakukan perubahan target dan indikator-indikator SPM bidang pendidikan pada dokumen perubahan RPJMD periode perencanaan tahun 2024-2026 yang diikuti perubahan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Pada tahun 2023 dan 2024 Kemendikbudristek menyampaikan Surat Kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia, dalam hal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota maka atas dasar surat tersebut indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan merujuk pada Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan di daerah.

Interpretasi *GAP*/ Kesenjangan Pelayanan dan pencapaian target kinerja serta faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan dan pencapaian kinerja tersebut

Berdasarkan tabel 4, Perubahan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi periode perencanaan tahun 2024-2026 telah terintegrasi dengan Indikator Kinerja SPM bidang Pendidikan. Berdasarkan Surat Mendikbudristek diatas di ketahui capaian kinerja urusan pendidikan di Provinsi Jambi dari tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Provinsi Jambi

No	Indikator	Capain Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 -18 Tahun	72,49%	72,52%	72.46%	71,97%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	27,09%	29,85%	59.78%	59,78%
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	43,72%	90,69%	90.06%	81,6%
4	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	42,90%	42,90%	79.46%	74,48%
5	Skor Kemampuan Literasi SMA	61,35	61,34	67.16	70,1
6	Skor Kemampuan Numerasi SMA	49,79	52,01	56.69	60,05
7	Skor Kemampuan Literasi SMK	58,70	57,46	63.17	64,73
8	Skor Kemampuan Numerasi SMK	48,48	49,62	53.87	56,19
9	Skor Kemampuan Literasi SDLB	42,73	50,84	52.73	60,42

No	Indikator	Capain Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
10	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	41,70	53,02	45.58	54,07
11	Skor Kemampuan Literasi SMPLB	52,89	52,77	50.75	55,53
12	Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	53,78	47,95	52.39	53,55
13	Skor Kemampuan Literasi SMALB	55,40	46,41	47.77	57,69
14	Skor Kemampuan Numerasi SMALB	48,44	45,90	49.55	57,91
15	Iklm Keamanan SMA	73,85	68,63	71.43	70,95
16	Iklm Kebinekaan SMA	61,00	66,68	72.42	71,08
17	Iklm Inklusivitas SMA	53,41	55,94	57.49	58,85
18	Iklm Keamanan SMK	69,88	65,54	67.72	67,46
19	Iklm Kebinekaan SMK	59,88	64,43	69.07	68,65
20	Iklm Inklusivitas SMK	52,25	54,64	54.74	55,33
21	Iklm Keamanan SDLB	79,56	73,72	72.41	74,38
22	Iklm Kebinekaan SDLB	61,69	69,42	65.16	65,23
23	Iklm Inklusivitas SDLB	55,74	57,69	58.71	64,31
24	Iklm Keamanan SMPLB	79,20	65,12	63.46	64,08
25	Iklm Kebinekaan SMPLB	61,47	64,85	63.43	66,62
26	Iklm Inklusivitas SMPLB	55,20	57,27	55.78	62,62
27	Iklm Keamanan SMALB	65,79	59,54	59.63	69,18
28	Iklm Kebinekaan SMALB	62,34	64,58	61.79	66,62
29	Iklm Inklusivitas SMALB	58,35	53,10	58.48	63,18

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 5 diatas terlihat tren indikator kinerja dari tahun 2021-2024 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Tren indikator Angka Partisipasi Sekolah Umur 16-18 Tahun menurun dari tahun 2022 sampai tahun 2024 namun sebaliknya Angka Partisipasi Sekolah umur 4-18 tahun penyandang disabilitas mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023 dan pada tahun 2024 masih bertahan.

Upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah diantaranya adalah penambahan ruang kelas dan rehabilitas ruang kelas, bertambahnya Unit Sekolah Baru (USB) yang telah dibangun sejak tahun 2022-2023 diharapkan memberikan akses bagi peserta didik disabilitas untuk dapat

bersekolah sehingga memudahkan orang tua peserta didik disabilitas untuk mengantarkan anaknya bersekolah. Adapun USB SLB yang telah dibangun pada tahun 2022 yaitu USB SLB Kerinci, USB Sungai Bahar dan USB Kuala Tungkal. Sedangkan pada tahun 2024 telah dibangun SLB Singkut di Kabupaten Sarolangun. Disamping itu program unggulan DUMISAKE juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka partisipasi sekolah berupa pemberian bantuan biaya personil dan perlengkapan peserta didik bagi peserta didik SMA, SMK dan SLB yang tergolong keluarga miskin se Provinsi Jambi.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mencapai sasaran Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Khusus diantaranya masih terbatasnya sumber daya dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) umur 16-18 tahun dan 4-18 tahun penyandang disabilitas sehingga pada tahun 2024, baru melakukan pencegahan bagi anak putus sekolah dan belum melakukan penanganan ATS dengan kategori anak putus sekolah, anak lulus tidak melanjutkan dan anak belum pernah bersekolah dengan target agar anak tersebut dapat kembali bersekolah atau 100% bersekolah.

- b. Tren indikator Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada tahun 2022 terjadinya peningkatan yang signifikan namun terjadi penurunan dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebaliknya indikator Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK mengalami fluktuasi, meningkat signifikan pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024. Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha.

Adapun faktor penunjang ketercapaian indikator ini diantaranya peningkatan pembelajaran, penguatan SDM, penyesuaian kompetensi serta beberapa peningkatan kualitas standar sarana dan prasarana sehingga meningkatkan jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja dalam jangka waktu satu tahun kelulusan. Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berupa sertifikasi alumni/ lulusan SMK melalui uji kompetensi keahlian dengan lembaga sertifikat profesi pihak 1 (LSP-P1) oleh BNSP, Optimalisasi peran dan fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) yang terdapat di SMK sebagai

lembaga penempatan/ penyaluran tenaga kerja, pemenuhan sarana prasarana peralatan pendidikan SMK negeri dan swasta melalui DAK fisik dalam rangka peningkatan kompetensi siswa, optimalisasi kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) yang diharapkan bermuara pada penerimaan tenaga kerja oleh DU/DI, peningkatan kompetensi Guru vokasi melalui pendidikan upskilling dan reskilling yang dilaksanakan oleh BBPPMPV dan penyelarasan kurikulum SMK dengan DU/DI sesuai dengan tuntutan teknologi terkini. Selain itu juga ada MOU dengan luar negeri melalui program pelatihan kejuruan di Jerman yang bisa diikuti oleh siswa SMK.

Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Lulusan SMK diantaranya keterbatasan Guru Produktif/ Kejuruan, Mutu sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan, peran dunia usaha/ dunia (DU/DI) yang belum optimal terutama dalam penyelarasan kurikulum dan kesesuaian antara konsentrasi keahlian yang ada disekolah dengan kebutuhan DU/DI. Disamping itu juga kurangnya partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kepada anak sehingga kurangnya dukungan dari pihak keluarga bagi siswa untuk berwirausaha.

- c. Secara keseluruhan tren indikator Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2024 namun terdapat indikator kinerja yang mengalami capaian yang fluktuasi yaitu pada indikator Skor Kemampuan Numerasi SDLB, SMPLB dan Skor Kemampuan Literasi SMPLB hingga pada akhirnya meningkat pada tahun 2024. Dengan kondisi yang sama indikator skor iklim juga mengalami tren yang berfluktuasi yaitu Iklim Keamanan SMA, SMK, SDLB dan SMPLB yaitu Skor Iklim Kebhinekaan SDLB, SMPLB, SMALB dan juga Skor Iklim Inklusifitas SMPLB serta SMALB.

Kemendikbudristek terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan kinerja pendidikan dengan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi diseluruh jenjang melalui program-program Merdeka Belajar. Untuk mendukung upaya tersebut maka melalui kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2024, Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jambi telah menggunakan Kurikulum Merdeka untuk menyusun kurikulum sekolah yang sesuai kondisi lokal, menerapkan asesmen diagnostik dan pembelajaran terdiferensiasi, serta menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengasah karakter Profil Pelajar Pancasila. Disamping siswa, Guru menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengakses materi Kurikulum Merdeka, ikut pelatihan pembelajaran serta berbagi dan belajar dari sesama guru dalam komunitas belajar guru.

Dalam menyusun perencanaan bidang pendidikan, Satuan Pendidikan maupun Dinas Pendidikan sama-sama menggunakan Rapor Pendidikan baik Rapor Sekolah bagi Satuan Pendidikan dan Rapor Pemerintah Daerah (PEMDA) bagi Dinas Pendidikan. Rapor Pendidikan tersebut merupakan hasil Asesmen Nasional pada Platform Rapor Pendidikan yang dapat diakses pada halaman berikut: <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/login> untuk identifikasi masalah pembelajaran, merefleksikan penyebab masalah dan merancang serta melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membenahi masalah pembelajaran. Selain itu, Pemerintah Daerah mengangkat Guru Penggerak agar dapat mendapatkan kesempatan menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas yang diseleksi dan dilatih menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mentransformasi sekolah menjadi lingkungan belajar yang aman, efektif, inklusif dan menyenangkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah masih ada satuan pendidikan yang kurang memahami Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada satuan pendidikan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) yang bersinergi dengan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk dilakukan pembenahan atas permasalahan yang terjadi terkait indikator kinerja literasi, numerasi dan iklim berdasarkan hasil Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan dan juga pemahaman Satuan Pendidikan tentang tata cara pengisian Survey Lingkungan Belajar (Sulingjar) pada satuan pendidikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB. Disamping itu permasalahan Pendidikan Profesi Guru yang

belum dirasa memuaskan yang disebabkan proses sertifikasi guru yang rumit dan keterbatasan kuota.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.24.)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke -			Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.758.884.634	999.130.336	868.436.804	1.222.466.483	899.155.130	681.468.211	69,50	89,99	78,47	-28,14	-25,33
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	688.766.006.872	650.696.629.637	776.352.174.799	655.168.722.959	606.346.479.890	763.061.258.002	95,12	93,18	98,29	6,89	9,20
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	742.096.000	541.939.160	267.508.000	613.459.240	507.161.250	41.693.000	82,67	93,58	15,59	-38,81	-54,55
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28.465.000	100.000.000	40.000.000	17.564.970	88.451.719	5.317.100	61,71	88,45	13,29	95,65	154,79
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.181.924.295	732.966.600	300.037.220	911.441.971	705.875.719	148.667.094	77,12	96,30	49,55	-48,53	-50,75
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.705.102.465	4.303.439.290	2.917.752.843	3.141.093.115	4.165.959.431	1.949.135.812	84,78	96,81	66,80	-8,03	-10,29
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.050.798	552.320.816	840.894.150	643.821.542	316.014.500	755.098.300	99,96	57,22	89,80	19,00	44,01
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.589.923.000	5.171.585.502	4.549.388.517	3.924.701.875	4.778.386.382	4.320.605.544	85,51	92,40	94,97	0,32	6,09
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.487.629.509	1.698.954.200	1.399.715.800	2.343.577.842	1.643.014.725	447.069.950	94,21	96,71	31,94	-24,66	-51,34
9. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	200.024.620.369	208.314.867.199	226.203.000.671	198.418.790.692	206.563.908.257	221.977.029.689	99,20	99,16	98,13	6,37	5,78
10. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	241.221.257.932	221.564.541.958	232.207.487.090	228.614.214.103	217.151.723.768	228.920.608.259	94,77	98,01	98,58	-1,67	0,20
11. Pengelolaan Pendidikan Khusus	31.632.055.353	22.731.265.716	26.484.033.149	29.827.804.863	22.468.437.091	24.573.994.721	94,30	98,84	92,79	-5,81	-7,65
12. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	750.000.000	35.260.000	0	698.849.810	31.660.000	0	93,18	89,79	0,00	-97,65	-97,73
13. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	217.414.000	210.850.928	99.999.900	95.985.000	207.196.500	99.986.900	44,15	98,27	99,99	-27,80	32,06
14. Pindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	46.932.273.388	46.284.198.915	44.143.542.390	44.930.173.861	45.222.213.793	41.419.699.396	95,73	97,71	93,83	-3,00	-3,88
15. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30.670.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000	169.399.826	99.999.900	250.380.250	166.799.756	59.294.400	83,46	98,47	59,29	-42,25	-48,92
Jumlah	1.225.012.373.865	1.164.107.350.083	1.316.773.971.233	1.170.823.048.576	1.111.262.437.911	1.288.460.926.378	95,58	95,46	97,85	4,07	5,43

Berdasarkan tabel 6 diatas, anggaran Dinas Pendidikan bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik dan non fisik. Jika dilihat rasio antara total anggaran dan realisasi, rata-rata diatas 95% yang dapat dikategorikan baik yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya anggaran berbasis kinerja yang optimal berdasarkan tugas dan fungsi dan kebijakan operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sedangkan tidak terserapnya keseluruhan anggaran tersebut dapat dipengaruhi dari sisi ekonomis antara perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip efektif dan efisien baik penggunaan dana bersumber dari APBD maupun DAK .

Jika dilihat dari jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada program dan kegiatan prioritas yang direncanakan selama 3 tahun periode 2022-2024, diketahui pada Program Pengelolaan Pendidikan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan anggaran positif diringi rasio antara realisasi dan capaian dengan kategori baik sedangkan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus mengalami fluktuasi anggaran dengan rata-rata pertumbuhan anggaran negatif yaitu terjadi penurunan pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 namun rasio antara realisasi dan capaian dengan kategori baik.

Selain Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga merupakan program prioritas dengan Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi menunjukkan penurunan anggaran setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan anggaran negatif namun rasio antara realisasi dan capaian dengan kategori baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas mengindikasikan ada beberapa kesenjangan/ gap pelayanan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diantaranya kebutuhan anggaran yang diperlukan pada Program Pengelolaan Pendidikan terutama kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA meningkat setiap tahunnya yang di dominasi oleh sumber dana DAK Fisik dan Non Fisik. Berbeda dengan kebutuhan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK dan Pendidikan Khusus yang mengalami anggaran yang berfluktuatif yang sama-sama sumber anggarannya di dominasi oleh dana DAK Fisik dan Non Fisik . Sementara pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

melalui Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi mengalami penurunan setiap tahunnya yang didominasi oleh pembiayaan gaji Guru honorer atau Guru Tidak Tetap/ GTT yang menyesuaikan kebutuhan jumlah Guru honorer yang dibebankan dalam APBD setiap tahunnya.

Selain Program prioritas, anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi juga mengalami penurunan dan kenaikan yang menyesuaikan kebutuhan dalam memfasilitasi dan dukungan administratif untuk kelancaran operasional perangkat daerah, mencakup kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hingga penyediaan jasa penunjang (listrik, air, komunikasi, surat-menyurat, dan pelayanan umum kantor) agar kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berjalan optimal.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Kedudukan Tugas dan Fungsi, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah:

- a. Peserta Didik (Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa SLB) yang menjadi sasaran utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa) di satuan pendidikan, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, insentif kesejahteraan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- c. Sekolah (Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB) yang difasilitasi operasional sekolah berupa sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara efektif.

- d. Orang Tua sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
- e. Anak-anak dari kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemeberian Pelayanan

Selama ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.
2. Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu atau bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah.
6. Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
7. Aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dalam program Sekolah Ramah Anak, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Sosialisasi Tertib berlalulintas, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Judi Online serta perlindungan terhadap warga sekolah baik pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

8. Pemerintah Desa dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
9. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru.
10. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan mitra-mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Belum meratanya Kualitas Sumber Daya di Provinsi Jambi merupakan hasil indentifikasi permasalahan pembangunan bidang pendidikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Periode tahun 2025-2029, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) disamping itu IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur Panjang dan Hidup Sehat (Indeks Kesehatan), Standar Hidup Layak (Indeks Pengeluaran) dan Pengetahuan (Indeks Pendidikan).

Diketahui bahwa IPM Provinsi Jambi pada tahun 2024 masih berada di bawah IPM rata-rata nasional, bahkan bila dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Jambi berada di urutan 18 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Seperti diketahui IPM rata-rata nasional sebesar 75,02 dan IPM Provinsi Jambi sebesar 74,36 dan jika dilihat

indeks pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Provinsi Jambi berada di urutan 21 dari 38 Provinsi yaitu sebesar 8,90 tahun.

Pada RPJPN 2025-2045 **Indeks Modal Manusia (IMM)** menjadi pengganti indikator **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang merupakan salah satu dari 45 indikator imperatif untuk mencapai sasaran visi “meningkatnya daya saing sumber daya manusia”. Berdasarkan siaran pers pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan judul “Human Capital Index membaik, Indonesia Harus Jaga Konsistensi di Tengah Pandemi”, Indikator yang digunakan dalam IMM sedikit berbeda dengan IPM dimana dalam IMM terdapat tiga dimensi yaitu:

- a. Survival, Kemampuan bertahan hidup sampai usia lima tahun.
- b. Pendidikan, Harapan lama sekolah dan kualitas pendidikan (diukur dari skor tes).
- c. Kesehatan, Kelangsungan hidup usia 15-60 tahun dan persentase balita tidak stunting.

Strategi pembangunan berpusat pada manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta memungkinkan Manusia untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar dan memanfaatkan modal sosial budaya. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan sehingga Indeks Modal Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Indeks Modal Manusia adalah model ukur yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang terjadi selama periode tumbuh kembang manusia.

Berdasarkan dimensi IMM diatas, khususnya dimensi Pendidikan yaitu Harapan lama sekolah (terkait erat dengan akses pendidikan karena menunjukkan seberapa jauh seseorang diharapkan dapat melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi) dan kualitas pendidikan (diukur dari skor tes) maka dapat identifikasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jambi yang dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut yaitu :

Tabel 7. Pemetaan Masalah Pembangunan Pendidikan Provinsi Jambi (Tabel T.B-35)

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rendahnya minat menempuh pendidikan menengah di beberapa wilayah Provinsi Jambi	Masih terdapat siswa tidak melanjutkan ke pendidikan menengah dan putus sekolah terkendala biaya personal bagi peserta didik keluarga miskin Belum tersedianya data jumlah anak usia 16-18 tahun dan 4-18 tahun anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah
		Kurangnya pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus	Masih terdapat satuan pendidikan kekurangan ruang kelas dan daerah yang membutuhkan sekolah baru
2	Belum terpenuhinya standar kualitas maupun kuantitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan	Masih banyak Satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB belum memenuhi standar sarana dan prasarana	Pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana di satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB belum maksimal Ketimpangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana antar satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB Negeri dan Swasta masih tinggi
3	Masih rendahnya tingkat keterserapan dunia usaha dan dunia industri bagi lulusan SMK	Belum optimalnya relevansi SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Kemitraan antara SMK dan dunia kerja belum optimal Kurangnya SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 terhadap lulusan SMK yang mempunyai Keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri Belum optimalnya kompetensi keahlian pendidik dan tenaga kependidikan SMK Belum optimalnya ruang praktik dan peralatan praktik penunjang pembelajaran yang sesuai dengan standar industri

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
4	Rapor Pendidikan Provinsi Jambi secara keseluruhan belum baik	Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan sebaran pendidik, tenaga kependidikan	Belum mencukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum merata
			Masih terdapat Pendidik dan Tenaga kependidikan yang belum berkualifikasi dan berkompetensi secara optimal atau belum bersertifikat
			Belum sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan PMM sebagai pendukung pergerakan kurikulum merdeka
			Masih terdapat kendala yang perlu diatasi agar komunitas belajar dapat berjalan secara optimal
			Kurangnya pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menunjang proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan yang disebabkan kurangnya fasilitas TIK dan kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan TIK
		Masih terdapat kondisi belum kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan	Dukungan perlengkapan pembelajaran pada Satuan Pendidikan belum mencukupi
			Dukungan Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas pada Satuan Pendidikan masih rendah

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel pokok masalah, masalah dan akar masalah yang telah diurai, maka dapat dikembangkan indikasi tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaah Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2.2.2. Isu Strategis

RPJMN 2025-2029

Pendidikan merupakan mandat konstitusi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa yang penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan implementasinya menjadi bagian dari komitmen Pemerintah saat ini untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Salah satu arah atau tujuan pembangunan dari misi tersebut adalah “pendidikan berkualitas yang merata” yang tergabung dalam transformasi sosial untuk mewujudkan misi Asta Cita ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 maka secara umum isu-isu strategis pada bidang pendidikan yaitu perbaikan kebijakan yang perlu diakselerasi kedepan antara lain (1) Pemerataan akses pendidikan (2). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Hal tersebut untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan optimal dan merata keseluruh lapisan masyarakat.

RENSTRA Kemendikdasmen 2025-2029

Penyempurnaan Renstra Dinas Pendidikan sejalan dengan penetapan Renstra Kemendikdasmen dimana Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2025-2029, ditetapkan pada tanggal 07 Oktober 2025.

Adapun Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju**

menuju Indonesia Emas 2045”. Pada saat ini isu strategis transformasi sosial yang menjadi fokus pemerintah pusat antara lain :

- a. Partisipasi Pendidikan belum merata
- b. Kualitas Hasil Pembelajaran kategori sedang
- c. Pendidikan Vokasi masih belum terintegrasi dengan dunia usaha/ dunia industri secara optimal
- d. Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) APBD fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah.

Sebagai penerjemahan Asta Cita, Kemendikdasmen menginisiasi berbagai program prioritas yaitu :

1. Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
3. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan Guru
4. Penguatan Pendidikan karakter
5. Penguatan Pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi
6. Pengembangan talenta dan prestasi
7. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan

Selanjutnya Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, dan penguatan tatakelola Kementerian. Hal tersebut juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Terdapat 8 (delapan) Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang juga harus didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah, sebagai berikut:

1. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan

- a. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan peningkatan daya tampung, antara lain melalui upaya memberikan keberpihakan pada wilayah yang tidak memiliki satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, wilayah afirmasi, serta wilayah dengan angka partisipasi dan

kemampuan fiskal rendah, dan dengan memperhatikan data kebutuhan anak usia sekolah dan karakteristik wilayah.

- b. Pemenuhan dan perbaikan prasarana dan sarana layanan pendidikan, dengan memprioritaskan satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan tinggi, terdampak bencana, pada wilayah afirmasi, dengan mendorong pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar, dan kebutuhan pembelajaran.
- c. Pemenuhan bantuan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok ekonomi, dan peningkatan partisipasi pendidikan pada wilayah afirmasi, serta mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan.
- d. Penyediaan layanan dan pemenuhan bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan keberpihakan pada anak dengan disabilitas, anak pekerja migran, dan layanan pendidikan terdampak bencana.
- e. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) antara lain dengan penguatan pendataan tepat yang dapat mengidentifikasi ATS beserta isu yang dihadapi, pola penjangkauan tepat, pendampingan efektif untuk menumbuhkan minat sekolah pada ATS dan kesadaran akan pendidikan pada orang tua/wali dan masyarakat di lingkungan ATS, dan memastikan anak mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia, minat, dan karakteristik serta kebutuhan spesifik anak.
- f. Penguatan upaya pencegahan anak putus sekolah dengan mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah potensi putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, kondisi keluarga, serta faktor risiko lainnya, dan pendampingan pada anak berisiko putus sekolah dengan pendekatan konseling.
- g. Pengembangan dan penguatan layanan pembelajaran yang sesuai dan fleksibel untuk ATS, terutama terkait dengan isu anak yang bekerja, anak terlantar/anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, ataupun terkait isu remaja dalam pernikahan. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan

pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik.

- h. Penguatan penyelenggaraan layanan pendidikan khusus, dengan memastikan tersedianya layanan pada setiap wilayah, serta peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, untuk memberikan hak pendidikan yang berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus.
- i. Penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan dengan memperhatikan afirmasi wilayah dan kelompok usia.
- j. Penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, dan pendidikan jarak jauh, untuk dapat menjangkau yang selama ini tidak terjangkau layanan pendidikan.
- k. Peningkatan parenting, pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
- l. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan pelaku, dengan pemerintah daerah, industri/swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan relawan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kesadaran akan pendidikan, dan dalam membangun upaya positif dalam mengeliminasi faktor hambatan yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan.
- m. Pemenuhan fasilitas pada satuan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

2. **Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah**

Perluasan layanan pendidikan anak usia dini, terutama pada wilayah yang belum terlayani, dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, dan membangun komitmen daerah dalam penyediaan PAUD.

- a. Penguatan program untuk pemerataan kesempatan memperoleh layanan 1 (satu) tahun pendidikan anak usia dini terorganisir antara lain melalui pemenuhan layanan TK, dan TK-SD satu atap.
 - b. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak yang sedang PAUD, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.
 - c. Penyederhanaan perizinan PAUD agar dapat mengakomodir multi layanan berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD dalam satu atap.
 - d. Penguatan integrasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD-SD guna menyelaraskan antara capaian perkembangan pada level PAUD dan capaian pembelajaran fase awal SD.
 - e. Penguatan pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan efektif antara lain melalui peningkatan kolaborasi berbagai pihak mulai dari orang tua/wali peserta didik, guru, Dinas Pendidikan, serta Kementerian, selain itu perlu dibangunnya aspek kemampuan fondasi sejak PAUD hingga SD kelas awal untuk bekal anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta melalui penyediaan alat bantu sumber belajar bagi PAUD dan SD yang mendukung transisi PAUD ke SD.
 - f. Mendorong penerapan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) oleh daerah, melalui penguatan kerja sama lintas sektor.
3. **Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan**
- a. Penguatan pembelajaran yang mendorong penguasaan peserta didik terhadap keterampilan hidup dan *soft skills* masa depan sesuai kebutuhan.
 - b. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
 - c. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.

- d. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
- e. Peningkatan digitalisasi pembelajaran, untuk meningkatkan akses bahan ajar dan belajar yang lebih kaya dan berwawasan luas, pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kemampuan digital, dalam menyiapkan generasi muda yang lebih siap dan cakap mengikuti perkembangan teknologi.
- f. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM), serta penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
- g. Penerapan evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum dalam memberikan ruang bagi satuan pendidikan dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
- h. Penerapan asesmen nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem penilaian pendidikan yang berkualitas untuk mengukur kualitas dan memetakan capaian hasil belajar serta menjadi landasan dalam perbaikan pembelajaran dan layanan penyelenggaraan pendidikan.
- i. Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- j. Penguatan pendidikan karakter secara kultural dengan meningkatkan peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) menjadi catur pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media).
- k. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.

- l. Peningkatan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik, dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, dan pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- m. Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan basis data persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karier dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
- n. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.
- o. Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
- p. Pengoptimalan peran relawan pendidikan sebagai mitra strategis sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter, dan pemerataan pendidikan.
- q. Revitalisasi program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), untuk meningkatkan pendidikan gizi serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
- r. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan, dan upaya untuk menghindari adanya pemborosan makanan (food waste), serta pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab.
- s. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.

t. Dukungan penerapan kurikulum dan pembelajaran pada program sekolah rakyat.

4. Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karier, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas.
- b. Mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi, numerasi, sains, dan teknologi, pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah.
- c. Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV.
- d. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam.
- e. Peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong terwujudnya upaya positif dalam perbaikan kualitas belajar mengajar, dan kualitas satuan pendidikan secara menyeluruh.
- f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- g. Penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat.
- h. Penguatan pembelajaran kelas rangkap yang terutama dapat diterapkan pada kondisi satuan pendidikan dengan keterbatasan pendidik dan murid, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, serta memastikan keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, dengan mengedepankan ketercapaian pembelajaran berpusat pada anak.

5. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi

- a. Peningkatan kerja sama, keterlibatan, dan partisipasi industri/swasta untuk penyesuaian kurikulum dan model pembelajaran dengan standar industri, serta peningkatan penyediaan pemagangan dan praktik kerja.
- b. Penguatan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong pada penguasaan kewirausahaan, *soft skills* dan penanaman karakter kerja, dan kesiapan bekerja.
- c. Pengembangan model pembelajaran berkarakter/berstandar industri, seperti *teaching factory/industry*, dan secara selektif mengembangkan unit usaha pada satuan pendidikan yang memiliki kesiapan.
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan vokasi melalui peningkatan dan penyegaran keterampilan (*upskilling* dan *reskilling*), serta pembelajaran, program magang, dan kerja sama dengan industri.
- e. Peningkatan kualitas Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan mendorong kualitas layanan lembaga kursus dan pelatihan.
- f. Penguatan fasilitasi dan sistem sertifikasi kompetensi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi.

6. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan Bahasa Indonesia

- a. Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
- b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.

- c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
- d. Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
- e. Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

7. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan

- a. Peningkatan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN yang efektif dan efisien.
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
- c. Peningkatan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.

8. Penguatan tatakelola serta akuntabilitas Kementerian

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

Disamping isu-isu strategis dan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025-2029 diatas, berdasarkan Surat Mendikdasmen Tahun 2025 Hal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tanggal 24 Januari 2025, ada beberapa program prioritas kemendikdasmen yang perlu di dukung bersama antara lain :

- a. Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
- b. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
- c. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan
- d. Digitalisasi Sekolah
- e. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
- f. Sekolah Model Transformatif
- g. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah
- h. Wajib Belajar 13 tahun dan
- i. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada salah satu Program proiritas diatas yaitu Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan. PHTC ini juga sinkron dan sejalan dengan IKU dari Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah; dan menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029, berkenaan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. KLHS – RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJMD sehingga KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan,

maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dengan tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumusan, penyelenggaraan, pelayanan, pembinaan, pelaksanaan tugas bidang pendidikan, peningkatan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing serta optimalisasi kapasitas sumber daya apatur baik Guru maupun Tenaga Kependidikan memiliki peran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

Ada beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari dokumen perencanaan strategis (KHLS RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045) salah satunya yaitu masih rendahnya pelayanan dasar masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Jambi yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan tiga dimensi utama : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Jambi tercatat sebesar 74,36, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 73,73. Meskipun mengalami peningkatan, angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional dan lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain di Sumatra, seperti Kepulauan Riau (79,89) dan Sumatra Barat (76,43). IPM yang lebih rendah menunjukkan bahwa tantangan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masih menjadi hambatan utama bagi peningkatan kualitas SDM di Jambi.

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029 diantaranya KHLS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 menetapkan 5 (lima) isu Pembangunan Berkelanjutan Paling strategis yaitu : (1) Degradasi Lingkungan, (2) Keterbatasan Infrastruktur, (3) Kerentanan Bencana, (4) Tingginya tingkat Kemiskinan, dan (5) Tata Kelola yang belum optimal. Lima isu strategis tersebut merupakan hasil sintesis dari 59 isu pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi dari empat sumber.

2.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi yang dihadapi dengan memperhatikan dari berbagai hal seperti tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi dengan berbagai pertimbangan, antara lain : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki kekuatan terhadap pembangunan pendidikan, dan (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan hal tersebut maka, isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam perumusan Strategi dan Arah Kebijakan antara lain adalah :

Tabel 8. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (Tabel 2.1)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Tersedianya lembaga pendidikan SMA, SMK dan SLB yang tersebar di seluruh Kabupaten</p> <p>2. Dukungan program bantuan pendidikan (BOS, PIP, beasiswa daerah) dan regulasi daerah</p>	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan	Tingginya tingkat Kemiskinan	<p>Pengaruh Megatren Global terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia :</p> <p>1. Kemanusiaan universal dan kewarganegaraan</p> <p>2. Demografi penduduk dunia</p> <p>3. Perubahan iklim</p>	Layanan Pendidikan belum merata	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutam di daerah 3T	Akses pendidikan berkualitas masih belum merata
Dukungan sumber dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Belum terpenuhinya standar kualitas maupun kuantitas dan pemerataan sarana dan prasarana		Urbanisasi global	Kualitas Pendidikan Masih rendah	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah	Kualitas layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan berupa kompetensi dasar peserta didik, karakter peserta didik, lingkungan belajar serta proses pembelajaran
<p>1. Pengembangan SDM di sektor usaha dan industri</p> <p>2. Ekspansi lapangan pekerjaan baru melalui pelatihan dan sertifikasi</p>	Masih rendahnya tingkat keterserapan dunia usaha dan dunia industri bagi lulusan		Perubahan lanskap lapangan kerja	<p>1. Kualifikasi Pendidikan angkatan kerja masih rendah</p> <p>2. Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah</p>		Pendidikan vokasi SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri
<p>1. Tersedianya tenaga pendidik dengan latar belakang akademik yang layak</p> <p>2. Potensi pemanfaatan teknologi pendidikan (TIK) mulai tumbuh</p>	Rapor Pendidikan Provinsi Jambi secara keseluruhan belum baik		Pendidikan di tengah perkembangan teknologi	Kuantitas, kualitas dan distribusi Guru masih terbatas		Perlunya penguatan tata kelola untuk pendidik dan tenaga kependidikan berupa distribusi guru dan Peningkatan kompetensi Guru

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Normal, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan /atau memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi yang memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2029 yakni **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**.

Berdasarkan RPJMD 2025-2029 Provinsi Jambi telah dirumuskan sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Jambi salah satunya bidang pendidikan pada Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yakni **“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia”**, maka ditetapkan sasaran yaitu **“Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender”**. Khususnya bidang pendidikan sasaran dimaksud adalah mengacu pada peningkatan kualitas dan kuantitas anak usia sekolah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sehingga pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi kunci untuk mencapai hal tersebut.

Selain memperhatikan sasaran RPJMD diatas, untuk menentukan tujuan rencana strategis Dinas Pendidikan ada beberapa NPSK yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat yang menjadi dasar untuk merumuskan tujuan tersebut dengan pengertian bahwa Norma (aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah), Standar (acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Prosedur (Metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kriteria (ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah). NPSK dalam pembangunan

pendidikan di Provinsi Jambi mengacu pada amanat penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan diantaranya :

- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Pasal 18 : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Pasal 298 : Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintah Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pasal 16 : Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan K/L
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam menghasilkan guru profesional

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan dan ditentukan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus”** sedangkan Sasaran Renstra tersebut merupakan penjabaran

lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung tercapainya tujuan Renstra, adapun Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah **“Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kualitas Hasil Pembelajaran”**. Untuk mengetahui rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan (Tabel 3.3)

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD 2025-2029 Sasaran : MENINGKATNYA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENGARUSTAMAAN GENDER • NPSK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat : <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan - Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kualitas Hasil Pembelajaran	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	9,38-9,4	9,5	9,60	9,76	9,86-9,89	9,93
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat	100	100	100	100	100	100
			Tingkat kompetensi lulusan SMK (Rata-rata persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian dan persentase kepuasan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja terhadap lulusan yang bekerja)	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29	67,79
			Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional	79,96	81,29	82,63	83,96	85,30	86,64
			Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional	82,63	83,96	85,30	86,64	87,97	89,31

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 - Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam menghasilkan guru profesional			Persentase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional	34,72	40,28	45,83	51,39	56,94	62,50
			Persentase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional	43,06	48,61	54,17	59,72	65,28	70,83

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, dengan tujuan utama Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus. Sasaran ini diukur melalui indikator seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus, Tingkat kompetensi lulusan SMK, Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi/ numerasi Berdasarkan asesmen nasional dan Persentase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi/ Numerasi Berdasarkan asesmen nasional. Berdasarkan indikator tersebut target tahunan yang ditetapkan dari 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten untuk RLS dan HLS, serta target APK yang stabil, mencerminkan fokus Dinas Pendidikan pada pemerataan akses dan kualitas hasil pembelajaran. Keterangan tambahan bahwa beberapa indikator merupakan sasaran pemerintah daerah dan sebagian lainnya spesifik menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan memperjelas pembagian peran antarunit pemerintahan. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan strategi perencanaan berbasis indikator yang konkret, selaras dengan norma dan standar pelayanan minimal, serta berorientasi pada peningkatan capaian Indeks Modal Manusia (IMM) secara terukur.

3.2 Strategis dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029.

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran renstra.

Strategi Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus”** yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sarana pendidikan, pembangunan prasarana pendidikan di tempat yang masih kekurangan dan Program Revitalisasi Sekolah serta kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis secara optimal.

- b. Peningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta menurunkan Angka Putus pada SMA, SMK dan SLB.
- c. Meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri serta kewirausahaan.
- d. Meningkatkan jumlah pendidik yang berkompentensi dan kualitas pengelolaan bagi tenaga kependidikan.
- e. Meningkatkan karier Guru dan Tenaga Kependidikan.
- f. Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata.
- g. Meningkatkan Mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP).
- h. Penguatan kelompok kerja guru dalam pembelajaran menggunakan Deep Learning, Kecerdasan Artifisial dan Koding serta STEM.
- i. Menanamkan nilai nilai karakter peserta didik.
- j. Meningkatkan tata kelola, strategi pembiayaan, dan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan.

Berdasarkan strategi diatas, dilakukan penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Penahapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Peningkatan kualitas sarana pendidikan, pembangunan prasarana pendidikan di tempat yang masih kekurangan dan Program Revitalisasi Sekolah 2. Transformasi digital dalam layanan pendidikan	1. Percepatan Peningkatan kualitas sarana pendidikan, pembangunan prasarana pendidikan di tempat yang masih kekurangan dan Program Revitalisasi Sekolah 2. Percepatan Transformasi digital dalam layanan pendidikan	Keterserapan lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri serta kewirausahaan	Peningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta menurunkan Angka Rentan Putus Sekolah pada SMA, SMK dan SLB	1. Pemerataan kualitas dan distribusi guru 2. Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Lima tahap strategi pembangunan pendidikan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Tahap I (2026) dimulai dengan fokus pada Peningkatan kualitas sarana pendidikan, pembangunan prasarana pendidikan dan revitalisasi sekolah sebagai fondasi pemerataan layanan serta transformasi digital dalam layanan pendidikan. Dilanjutkan pada Tahap II (2027) dengan menekankan percepatan Percepatan Peningkatan kualitas sarana pendidikan, pembangunan prasarana pendidikan di tempat yang masih kekurangan dan Program Revitalisasi Sekolah serta Percepatan Transformasi digital dalam layanan pendidikan. Tahap III (2028) Peningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta menurunkan Angka Putus pada SMA, SMK dan SLB. Kemudian, Tahap IV (2029) Keterserapan lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri serta kewirausahaan. Akhirnya, Tahap V (2030) diarahkan pemerataan kualitas dan distribusi guru dan konsolidasi hasil dan keberlanjutan program agar dampak yang telah dicapai dapat terjaga dan menjadi dasar perencanaan jangka panjang berikutnya. Keseluruhan tahapan prioritas ini mencerminkan strategi yang progresif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan.

Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun arah dan kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 11. Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra (Tabel 3.5)

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi SPM : Integrasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RENSTRA dan RENJA Dinas Pendidikan). - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) - Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Bantuan Perlengkapan Peserta Didik : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dari keluarga tidak mampu 2) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu 3) Mengadakan dan menyalurkan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik o Operasionalisasi Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik : <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pemetaan wilayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah 2) Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu 3) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu di satuan pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat 4) Menyalurkan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Pendidikan bagi Siswa/i SMA/SMK/SLB Kurang Mampu dan Beasiswa S1 ,S2 dan S3 bagi Putra Putri Jambi Berprestasi dan Kurang Mampu 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pro Jambi Cerdas diantaranya bantuan pendidikan peserta didik SMA,SMK dan SLB bagi keluarga keluarga tidak mampu sekaligus sebagai kebijakan penanggulangan anak rentan putus sekolah. 	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada Sataun Pendidikan SMA, SMK dan SLB : Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school. - Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah: Fasilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pemetaan sekolah dan analisis kebutuhan revitalisasi sekolah berdasarkan Dapodik <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit sekolah baru • Pembangunan ruang kelas baru • Rehabilitasi ruang kelas pada satuan pendidikan dengan kondisi rusak sedang/berat yang telah terdata dalam Dapodik • Pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan yang tidak mencukupi anggaran pemeliharaannya • Pembangunan ruang praktik siswa (khusus untuk SMK) 2) Menyusun perencanaan dan melakukan verifikasi/survei lapangan 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalisasi sekolah 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan dan perumahan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dana alokasi Khusus (DAK) dalam rangka peningkatan kualitas sarana pendidikan dan pembangunan prasarana pendidikan di tempat yang masih kekurangan serta Program Revitalisasi Sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,nyaman dan menyenangkan bagi siswa dan juga kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis secara optimal. 	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan : Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jenjang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem : Program ini memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan fokus pada pembangunan serta peningkatan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI) peran dan tugas gubernur sebagai kepala daerah provinsi: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia 3-6 dalam pendidikan PAUD khusus; Meningkatnya Proporsi mutu layanan Satuan PAUD khusus; Dukungan kebijakan untuk penguatan karir guru PAUD khusus o Operasionalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI) peran dan tugas Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) : Meningkatnya mutu dan partisipasi PAUD di Kabupaten/Kota dengan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. 		<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan. - Mengekoordinasikan, perencanaan, supervisi kebijakan PAUDHI di satuan PAUD yang bersifat lintas kabupaten/kota - Menyelenggarakan PAUDHI yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi - Pemenuhan Daya tampung satuan PAUD khusus bagi anak usia 3-6 tahun - Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap mutu layanan PAUDHI di satuan PAUD khusus (SPM) - Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan PAUDHI di satuan PAUD khusus. - Dukungan kebijakan untuk penguatan karir guru PAUD khusus 	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik. - Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Kerjasama Kemitraan dengan DUDI : Memfasilitasi SMK dan/atau memperluas jejaring dengan dunia kerja dengan sektor yang relevan bagi SMK (misal: menyediakan forum pertemuan dan diskusi antar kepala sekolah SMK dengan perwakilan berbagai perusahaan; bekerja sama dengan Kamar Dagang Industri/Kadin Daerah). o Operasionalisasi Penyelarasan Kurikulum SMK dengan DUDI : Mendampingi SMK dalam menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan dunia kerja. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan dunia kerja dapat berkontribusi aktif dalam hal-hal berikut ini di SMK: <ul style="list-style-type: none"> • penyelarasan kurikulum berbasis industri; • peningkatan kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; • penyediaan pendidik tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi; • pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana • sertifikasi kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; • praktik kerja lapangan bagi peserta didik; • rekrutmen lulusan pendidikan vokasi; dan o Operasionalisasi Menambah lembaga sertifikasi profesi pada SMK : Fasilitasi penyediaan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK minimal KKNi level II dari berbagai lembaga pengelola sertifikasi, seperti LSP P1, LSP P2, maupun LSP P3. o Operasionalisasi Kompetensi Guru Vokasi : Fasilitasi pelaksanaan pelatihan, magang, workshop, training kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK o Operasionalisasi Memaksimalkan peran BKK : Memfasilitasi satuan pendidikan dalam peningkatan kapasitas kemitraan BKK dengan dunia kerja, misalnya: penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Vokasi Secara Kemitraan dengan Lembaga/Dunia Usaha Baik Dalam dan Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Kerja sama kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang diharapkan bermuara pada penerimaan tenaga kerja oleh DU/DI tersebut - Penyelarasan Kurikulum SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai dengan tuntutan teknologi terkini - Menambah lembaga sertifikasi profesi pada SMK dengan Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan Pendampingan SMK untuk menjadi LSP P1 - Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi melalui Pendidikan Upskilling dan Reskilling yang dilaksanakan oleh BBPPMPV - Memaksimalkan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) pada satuan pendidikan SMK dengan Memfasilitasi kelembagaan dan tata kelola manajemen BKK dalam rangka 	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan	Keterangan
<p>job fair, komunikasi dengan lembaga lain yang terkait (seperti, Disnaker), magang, dan penyelarasan kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Sarana-Prasarana Peralatan SMK: Memfasilitasi perlengkapan sarana dan prasarana di SMK sesuai standar dunia kerja melalui berbagai pembiayaan (seperti: APBD, DAK Fisik, hibah, atau pembiayaan dunia kerja) serta memastikan prosesnya transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. - Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2626/B/Hk.04.01/2023 Tentang Model Kompetensi Guru <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Kompetensi Guru : Memfasilitasi peningkatan kompetensi Guru SMA, SMK dan SLB bekerjasama dengan UPT Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi (BPMP), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jambi, Balai Bahasa Provinsi Jambi dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik (MEDAN) - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamomg Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik. <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi uji kompetensi : Memfasilitasi uji kompetensi bagi jabatan fungsional Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas 		<p>meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job matching dan job fair</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Sarana-Prasarana Peralatan SMK Negeri dan Swasta melalui DAK Fisik dalam rangka peningkatan kompetensi siswa - Bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemendidasmen dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan guru melalui program-program pembinaan yang kontekstual untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik akademik dan juga non akademik sebagai Guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk pengembangan bakat dan minat, serta mendampingi murid dengan masalah psikologisnya yang sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. - Meningkatkan transparansi dan kredibilitas mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional bagi guru dan tenaga kependidikan 	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas : Melaksanakan Pemetaan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata - Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan (pasal 7 ayat 2) dan (pasal 21 ayat 4) <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi Pemanfaatan TIK dan pembinaan kelompok pendidik/ kelompok kerja guru: <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pemanfaatan TIK termasuk pengembangan konten untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan • Fasilitasi penguatan kelompok kerja guru dalam pembelajaran menggunakan Deep Learning, Kecerdasan Artifisial dan Koding. - Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti - Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal - Surat Edaran Bersama Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemenag Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> o Operasionalisasi penguatan karakter siswa : Fasilitasi penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat 		<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan insntansi terkait dengan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Non PNS menjadi PNS serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata - Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK Pendiidkan melalui Program Digitalisasi Sekolah untuk kepentingan pembelajaran pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan - Melakukan pembinaan kepada kelompok pendidik/kelompok kerja guru (KKG/MGMP) terkait pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan koding. - Penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat 	

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

4.1 Uraian Program

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029 maka dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyusun berbagai program dan kegiatan yang terarah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut diantaranya :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang pendidikan. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik, program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, program penunjang menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program utama seperti Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks), Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) dan Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai). Melalui penguatan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berupaya membangun sistem manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap

dinamika pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis pembangunan daerah di sektor pendidikan.

- b. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan program utama yang secara langsung mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat, mulai dari Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran dan penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, program ini dirancang untuk mencapai indikator-indikator strategis diantaranya peningkatan Tingkat Partisipasi Sekolah, Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK, Rata-rata kompetensi Literas/Numerasi SMA, SMK, SDLB, SMP dan SMALB, Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas SMA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus sebagai bagian integral dari pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- c. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan program pendukung penting dalam pengelolaan pendidikan karena menjembatani kurikulum nasional dengan kebutuhan, potensi, dan kekhasan daerah, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan, kontekstual, meningkatkan karakter siswa, dan mempromosikan pelestarian budaya lokal, sejalan dengan desentralisasi pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Adapun indikator dari program ini adalah Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- d. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bertujuan untuk memastikan ketersediaan, distribusi yang adil, dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten di seluruh satuan pendidikan di Provinsi Jambi, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Adapun indikator ini program ini adalah Indeks Distribusi Guru SLB

(Indeks), Indeks Distribusi Guru SMA (Indeks), Indeks Distribusi Guru SMK dan Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase).

- e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan merupakan program penunjang yang krusial dalam kerangka tata kelola pendidikan. Dengan peran utamanya sebagai program pendukung yaitu sebagai Penjaminan Mutu, Legalitas, Perlindungan, Pemutakhiran Data dan Pengawasan Operasional. Adapun indikator pada program ini adalah Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui.
- f. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra merupakan program yang berfungsi sebagai pendukung utama dalam pembentukan karakter, penguatan literasi, dan pemersatu bangsa, yang secara langsung mendukung tujuan pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan. Adapun indikator pada program ini adalah Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Kewenangan Provinsi.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam mewujudkan program diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan di Provinsi Jambi. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas hasil pembelajaran. Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
3. Pengelolaan Pendidikan Khusus

c. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus

d. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi

e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

f. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output konkret, dan subkegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis.

Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis Dinas Pendidikan, seperti akses pendidikan berkualitas masih belum merata, kualitas layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan berupa kompetensi dasar peserta didik, karakter peserta didik, lingkungan belajar serta proses pembelajaran, Pendidikan vokasi SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri, perlunya penguatan tata kelola untuk pendidik dan tenaga kependidikan berupa distribusi guru dan Peningkatan kompetensi Guru. Dengan pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 12. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (Tabel. 4.2)

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	
RPJMD 2025-2029 Sasaran : MENINGKATNYA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENGARUSTAMAAN GENDER NPSK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat : - Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan - Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah - Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus				Rata-rata lama sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun			
					Harapan Lama Sekolah			
		Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kualitas Hasil Pembelajaran				Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat		
				Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Meningkatnya Daya Tampung Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas	Persentase Daya Tampung Murid Baru SMA	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
							1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
							1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
							1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
							1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
							1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
						1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah		
						1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 - Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam menghasilkan guru profesional						1.01.02.1.01.0015 - Pembangunan Fasilitas Parkir	
						1.01.02.1.01.0016 - Pembangunan Kantin Sekolah	
						1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						1.01.02.1.01.0027 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
						1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
						1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah	
						1.01.02.1.01.0037 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
						1.01.02.1.01.0038 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						1.01.02.1.01.0040 - Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	
						1.01.02.1.01.0043 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	
						1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.01.0064 - Penyediaan infrastruktur TIK	
						1.01.02.1.01.0067 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
						1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
						1.01.02.1.01.0070 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
						1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
						1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
						1.01.02.1.01.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	
						1.01.02.1.01.0077 - Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	
				Meningkatnya dukungan Kepada Anak Usia Sekolah Pendidikan Menengah yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Jumlah Peserta Didik SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan Pendidikan	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.01.0039 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	
						1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya Daya Tampung Peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Daya Tampung Murid Baru SMK	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
						1.01.02.1.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
						1.01.02.1.02.0005 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
						1.01.02.1.02.0006 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						1.01.02.1.02.0007 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
						1.01.02.1.02.0008 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
						1.01.02.1.02.0009 - Pembangunan Asrama Sekolah	
						1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.02.0011 - Pembangunan Fasilitas Parkir	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.02.0012 - Pembangunan Kantin Sekolah	
						1.01.02.1.02.0016 - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						1.01.02.1.02.0018 - Rehabilitasi Ruang Laboratorium	
						1.01.02.1.02.0019 - Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah	
						1.01.02.1.02.0029 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
						1.01.02.1.02.0030 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						1.01.02.1.02.0032 - Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	
						1.01.02.1.02.0035 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	
						1.01.02.1.02.0047 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	
						1.01.02.1.02.0058 - Penyediaan infrastruktur TIK	
						1.01.02.1.02.0062 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.02.0064 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.02.0065 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
						1.01.02.1.02.0066 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	
						1.01.02.1.02.0067 - Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	
						1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
						1.01.02.1.02.0070 - Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	
						1.01.02.1.02.0071 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
						1.01.02.1.02.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
						1.01.02.1.02.0075 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	
				Meningkatnya dukungan Kepada Anak Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Jumlah Peserta Didik SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan Pendidikan	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						1.01.02.1.02.0031 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Daya Tampung Peserta Didik pada Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase Daya Tampung Peserta Didik SLB	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	
						1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
						1.01.02.1.03.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						1.01.02.1.03.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
						1.01.02.1.03.0006 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
						1.01.02.1.03.0007 - Pembangunan Asrama Sekolah	
						1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.03.0009 - Pembangunan Fasilitas Parkir	
						1.01.02.1.03.0010 - Pembangunan Kantin Sekolah	
						1.01.02.1.03.0014 - Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	
						1.01.02.1.03.0015 - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.03.0016 - Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	
						1.01.02.1.03.0017 - Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	
						1.01.02.1.03.0029 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
						1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah	
						1.01.02.1.03.0036 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
						1.01.02.1.03.0037 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						1.01.02.1.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	
						1.01.02.1.03.0053 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	
						1.01.02.1.03.0063 - Penyediaan infrastruktur TIK	
						1.01.02.1.03.0068 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
						1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.03.0074 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
						1.01.02.1.03.0075 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	
						1.01.02.1.03.0076 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
						1.01.02.1.03.0077 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	
						1.01.02.1.03.0078 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
						1.01.02.1.03.0079 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
						1.01.02.1.03.0080 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Meningkatnya dukungan Kepada Anak Usia Sekolah Pendidikan Khusus yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Persentase Peserta Didik SLB yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan Pendidikan	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSU	
						1.01.02.1.03.0038 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	
						1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kualitas Hasil Pembelajaran			Tingkat kompetensi lulusan SMK (Rata-rata persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian dan persentase kepuasan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja terhadap lulusan yang bekerja)		
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kualitas Lulusan SMK	1. Persentase lulusan yang melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan 3. Persentase lulusan yang berwirausaha	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
						1.01.02.1.02.0056 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	
				Meningkatnya Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						1.01.02.1.02.0033 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
						1.01.02.1.02.0060 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	
						1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
		Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kualitas Hasil Pembelajaran			<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional 2. Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional 3. Persentase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional 4. Persentase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional 		
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional 2. Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional 	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kemampuan Literasi/Numerasi Peserta Didik SMA	<p>1. Persentase peserta didik SMA berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)</p> <p>2. Persentase peserta didik SMA berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p>	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
						1.01.02.1.01.0041 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
						1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
						1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
						1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	
						1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
						1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.01.0063 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		1. Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional 2. Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Kemampuan Literasi/Numerasi Peserta Didik SMK	1. Persentase peserta didik SMK berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) 2. Persentase peserta didik SMK berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.		
						1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
						1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
						1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
						1.01.02.1.02.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.02.0057 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						1.01.02.1.02.0072 - Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		1. Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional 2. Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional 3. Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Berdasarkan Asesmen Nasional 4. Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional 5. Rata-rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional 6. Rata-rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional		
				Meningkatnya Kemampuan Literasi/Numerasi Peserta Didik SDLB, SMPLB dan SMALB	1. Persentase peserta didik SDLB berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks 2. Persentase peserta didik SMPLB berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks 3. Persentase peserta didik SMALB berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks 4. Persentase peserta didik SDLB berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur,	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan 5. Persentase peserta didik SMPLB berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan 6. Persentase peserta didik SMALB berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan		
						1.01.02.1.03.0040 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
						1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	
						1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	
						1.01.02.1.03.0056 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						1.01.02.1.03.0057 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
						1.01.02.1.03.0058 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.03.0062 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	
						1.01.02.1.03.0065 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	
						1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
						1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.03.0081 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		1. Iklim Keamanan SMA 2. Iklim Kebinekaan SMA 3. Iklim Inklusivitas SMA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Menurunnya terjadinya perundungan, kekerasan dan intoleransi pada satuan pendidikan	Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.02.1.01.0061 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		1. Iklim Keamanan SMK 2. Iklim Kebinekaan SMK 3. Iklim Inklusivitas SMK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Menurunnya terjadinya perundungan, kekerasan dan intoleransi pada satuan pendidikan	Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan)	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						1.01.02.1.02.0054 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas		Iklim Keamanan SDLB 1. Iklim Kebinekaan SDLB 2. Iklim Inklusivitas SDLB 3. Iklim Keamanan SMPLB 4. Iklim Kebinekaan SMPLB 5. Iklim Inklusivitas SMPLB 6. Iklim Keamanan SMALB 7. Iklim Kebinekaan SMALB	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					8. Iklim Inklusivitas SMALB		
				Menurunnya terjadinya perundungan, kekerasan dan intoleransi pada satuan pendidikan	Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	
						1.01.02.1.03.0060 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Terakomodirnya muatan lokal dalam kurikulum sekolah		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Terwujudnya Pembelajaran Muatan Lokal dalam Kurikulum Sekolah pada SMA dan SMK	Jumlah Muatan Lokal yang ditetapkan dalam Kurikulum Sekolah pada SMA dan SMK	KEGIATAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	
						1.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
						1.01.03.1.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
						1.01.03.1.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
						1.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.03.1.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	
						1.01.03.1.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
				Terwujudnya Pembelajaran Muatan Lokal dalam Kurikulum Sekolah pada Pendidikan Khusus	Jumlah Muatan Lokal yang ditetapkan dalam Kurikulum Sekolah pada Pendidikan Khusus	KEGIATAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	
						1.01.03.1.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
						1.01.03.1.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
						1.01.03.1.02.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
						1.01.03.1.02.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	
						1.01.03.1.02.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	
						1.01.03.1.02.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan		1. Indeks Distribusi Guru SMA 2. Indeks Distribusi Guru SMK	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					3. Indeks Distribusi Guru SLB 4. Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik		
				Terwujudnya perhitungan, pemetaan dan pendistribusian bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan untuk pemerataan layanan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang dilakukan pemetaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	KEGIATAN PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI	
						1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
						1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
				Terwujudnya Izin Operasional Sekolah pada SMA dan SMK untuk pemerataan layanan pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan SMA dan SMK yang diterbitkan dan diperbarui Izin Operasional Sekolah	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	
						1.01.05.1.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						1.01.05.1.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Terbitnya/ diperbaruinya Izin Operasional Sekolah pada Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang diterbitkan dan diperbarui Izin Operasional Sekolah	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	
						1.01.05.1.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						1.01.05.1.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah		Persentase Satuan Pendidikan Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Kewenangan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
				Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra pada Satuan pendidikan untuk kelestarian bahasa dan sastra daerah	Jumlah Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra	KEGIATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	
						1.01.06.1.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	
						1.01.06.1.01.0013 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi	
		Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kualitas			1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat		

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		Hasil Pembelajaran			2. Tingkat kompetensi lulusan SMK 3. Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional 4. Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional 5. Persentase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional 6. Persentase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional		
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Persentase capaian realisasi fisik	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
						1.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						1.01.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
						1.01.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Meningkatnya Kualitas Penganggaran	1. Persentase realisasi keuangan 2. Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
						1.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
						1.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						1.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						1.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						1.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang difasilitasi	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
						1.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						1.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						1.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						1.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						1.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						1.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						1.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	
						1.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						1.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						1.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah	KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	
						1.01.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
						1.01.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
						1.01.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks layanan administrasi kepegawaian	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
						1.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						Prasarana Disiplin Pegawai	
						1.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						1.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						1.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						1.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						1.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						1.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						1.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
						1.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						1.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						1.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						1.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						1.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						1.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
						1.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						1.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						1.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						1.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
						1.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						1.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						1.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						1.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						1.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						1.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						1.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya layanan BLUD yang dipenuhi	Persentase Pelayanan BLUD	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	
						1.01.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel		Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
						1.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
						1.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						1.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						1.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						1.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						1.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
						1.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						1.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						1.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

Adapun rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan tersebut diatas dapat diuraikan pada tabel 12 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan sebagai berikut :

Tabel. 13 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan (Tabel 4.3)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.652.569.491.540,00		3.822.569.491.540,00		3.822.569.491.540,00		3.822.569.491.540,00		3.822.569.491.540,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.432.630.203.540,00		2.602.630.203.540,00		2.602.630.203.540,00		2.602.630.203.540,00		2.602.630.203.540,00		
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	92,92	94	2.432.630.203.540,00	95	2.602.630.203.540,00	96	2.602.630.203.540,00	97	2.602.630.203.540,00	98	2.602.630.203.540,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,95	78		80		82		83		84			
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	95,8	96,5		97		97,5		98		99			
1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.846.000.000,00		1.846.000.000,00		1.846.000.000,00		1.846.000.000,00		1.846.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1	1.420.000.000,00	1	1.420.000.000,00	1	1.420.000.000,00	1	1.420.000.000,00	1	1.420.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)														
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
1.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	270.000.000,00	2	270.000.000,00	2	270.000.000,00	2	270.000.000,00	2	270.000.000,00			
1.01.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Substansi)													
Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	356.000.000,00	1	356.000.000,00	1	356.000.000,00	1	356.000.000,00	1	356.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00		
1.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00		
1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.224.678.803.540,00		2.394.678.803.540,00		2.394.678.803.540,00		2.394.678.803.540,00		2.394.678.803.540,00		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2.224.678.803.540,00	1	2.394.678.803.540,00	2	2.394.678.803.540,00	2	2.394.678.803.540,00	2	2.394.678.803.540,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Realisasi Anggaran (Dokumen)														
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.625	9.950		9.950		9.950		9.950		9.950				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		18		12		12				
1.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.224.268.803.540,00		2.394.268.803.540,00		2.394.268.803.540,00		2.394.268.803.540,00		2.394.268.803.540,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.625	9.950	2.224.268.803.540,00	9.950	2.394.268.803.540,00	9.950	2.394.268.803.540,00	9.950	2.394.268.803.540,00	9.950	2.394.268.803.540,00			
1.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00			
1.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00		
1.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
1.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	18	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
1.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	9	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00		
1.01.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50		200		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
1.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
1.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	100.000.000,00	200	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
1.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.01.01.1.06 - Administrasi Umum				1.270.000.000,00		1.270.000.000,00		1.270.000.000,00		1.270.000.000,00		1.270.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Perangkat Daerah															
Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	1.270.000.000,00	2	1.270.000.000,00	2	1.270.000.000,00	2	1.270.000.000,00	2	1.270.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Disediakan (Paket)														
1.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	1	140.000.000,00			
1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00			
1.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
1.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00			
1.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
1.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
1.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00		
1.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
1.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				91.450.000.000,00		91.450.000.000,00		91.450.000.000,00		91.450.000.000,00		91.450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	5	91.450.000.000,00	5	91.450.000.000,00	5	91.450.000.000,00	5	91.450.000.000,00	5	91.450.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	20		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	65	65		65		65		65		65			
	1.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	15	30.000.000.000,00	15	30.000.000.000,00	15	30.000.000.000,00	15	30.000.000.000,00	15	30.000.000.000,00		
1.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	65	65	650.000.000,00	65	650.000.000,00	65	650.000.000,00	65	650.000.000,00	65	650.000.000,00		
1.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000.000,00		60.000.000.000,00		60.000.000.000,00		60.000.000.000,00		60.000.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	60.000.000.000,00	2	60.000.000.000,00	2	60.000.000.000,00	2	60.000.000.000,00	2	60.000.000.000,00		
1.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00		
1.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.565.000.000,00		4.565.000.000,00		4.565.000.000,00		4.565.000.000,00		4.565.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.565.000.000,00	12	4.565.000.000,00	12	4.565.000.000,00	12	4.565.000.000,00	12	4.565.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	710.000.000,00	12	710.000.000,00	12	710.000.000,00	12	710.000.000,00	12	710.000.000,00		
1.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Kantor yang Disediakan (Laporan)														
1.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.650.000.000,00		3.650.000.000,00		3.650.000.000,00		3.650.000.000,00		3.650.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.650.000.000,00	12	3.650.000.000,00	12	3.650.000.000,00	12	3.650.000.000,00	12	3.650.000.000,00			
1.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		1.260.000.000,00			
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	1.260.000.000,00	2	1.260.000.000,00	2	1.260.000.000,00	2	1.260.000.000,00	2	1.260.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	70		70		70		70		70				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37		37		37		37		37				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	46		46		46		46		46				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30		30		30		30		30			
1.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37	200.000.000,00	37	200.000.000,00	37	200.000.000,00	37	200.000.000,00	37	200.000.000,00		
1.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	46	400.000.000,00	46	400.000.000,00	46	400.000.000,00	46	400.000.000,00	46	400.000.000,00		
1.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	70	30.000.000,00	70	30.000.000,00	70	30.000.000,00	70	30.000.000,00	70	30.000.000,00		
1.01.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
1.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		
Meningkatnya layanan BLUD yang dipenuhi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	4	4	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00		
1.01.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang				106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		106.450.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Pelayanan BLUD																
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	4	4	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00	20	106.450.400.000,00				
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.215.439.288.000,00		1.215.439.288.000,00		1.215.439.288.000,00		1.215.439.288.000,00		1.215.439.288.000,00				
Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	71,97	72,65	1.215.439.288.000,00	72,99	1.215.439.288.000,00	73,33	1.215.439.288.000,00	73,67	1.215.439.288.000,00	74,01	1.215.439.288.000,00	1.215.439.288.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	59,78	75,87		76,96		78,05		79,14		80,23					
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)	81,60	85,72		87,77		89,83		91,89		93,95					
	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)	74,48	75,94		76,86		77,78		78,70		80,00					
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	70,10	71,30		71,90		72,50		73,10		73,70					
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,73	67,33		68,63		69,93		71,23		72,53					
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,42	63,62		65,22		66,82		68,42		70,02					
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	55,53	56,53		57,03		57,53		58,03		58,53					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,69	58,69		59,19		59,69		60,19		60,69			
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,05	63,25		64,85		66,45		68,05		69,65			
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	56,19	60,59		62,79		64,99		67,19		69,39			
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	54,07	55,27		55,87		56,47		57,07		57,67			
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	53,55	54,05		54,30		54,55		54,80		55,05			
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,91	58,91		59,41		59,91		60,41		60,91			
	Iklim Inklusivitas SMA (Nilai)	58,85	61,85		63,35		64,85		66,35		67,85			
	Iklim Inklusivitas SMK (Nilai)	55,33	59,93		62,23		64,53		66,83		69,13			
	Iklim Inklusivitas SDLB (Nilai)	64,31	66,91		68,21		69,51		70,81		72,11			
	Iklim inklusivitas SMPLB (Nilai)	62,62	65,42		66,82		68,22		69,62		71,02			
	Iklim inklusivitas SMALB (Nilai)	63,18	66,38		67,98		69,58		71,18		72,78			
	Iklim keamanan SMA (Nilai)	70,95	81,25		82,45		83,65		84,85		86,05			
	Iklim keamanan SMK (Nilai)	67,46	69,86		71,06		72,26		73,46		74,66			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Iklm keamanan SDLB (Nilai)	74,38	75,38		75,88		76,38		76,88		77,38			
	Iklm keamanan SMPLB (Nilai)	64,08	66,48		67,68		68,88		70,08		71,28			
	Iklm keamanan SMALB (Nilai)	69,18	71,78		73,08		74,39		75,68		76,98			
	Iklm kebinekaan SMA (Nilai)	71,08	73,08		74,08		75,08		76,08		77,08			
	Iklm kebinekaan SMK (Nilai)	68,65	71,25		72,55		73,85		75,15		76,45			
	Iklm kebinekaan SDLB (Nilai)	65,23	67,23		68,23		69,23		70,23		71,23			
	Iklm kebinekaan SMPLB (Nilai)	66,62	70,22		72,02		73,82		75,62		77,42			
	Iklm kebinekaan SMALB (Nilai)	68,82	72,82		74,82		76,82		78,82		80,82			
	Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan (TIKP) oleh satuan pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				711.939.288.000,00		711.689.288.000,00		712.039.288.000,00		712.539.288.000,00		712.689.288.000,00		
1.Meningkatnya Daya Tampung Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	26	134	645.429.288.000,00	134	645.179.288.000,00	134	645.529.288.000,00	134	646.029.288.000,00	134	646.179.288.000,00		
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	19		19		19		19		19			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	35	400		400		400		400		400			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	15		16		16		16		16			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	120		120		120		120		120			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	9	160		160		160		160		160			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	82		82		82		83		83			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	(Ruang)														
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	120		120		120		120		120		120		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	9		9		9		10		10		10		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	10		10		10		10		10		10		
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	18	3		3		3		3		3		3		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	7	1		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Direhabilitasi sedang/berat (Unit)														
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	246	267		267		267		267		267				
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	246	246		246		246		246		246				
1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00			
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00			
1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				5.250.000.000,00		5.250.000.000,00		5.600.000.000,00		5.600.000.000,00		5.600.000.000,00			
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	15	5.250.000.000,00	16	5.250.000.000,00	16	5.600.000.000,00	16	5.600.000.000,00	16	5.600.000.000,00			
1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00			
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	9	2.250.000.000,00	9	2.250.000.000,00	9	2.250.000.000,00	10	2.500.000.000,00	10	2.500.000.000,00			
1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				500.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	500.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00		
1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	18	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
1.01.02.1.01.0015 - Pembangunan Fasilitas Parkir				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00		
1.01.02.1.01.0016 - Pembangunan Kantin Sekolah				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00		
1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				59.679.288.000,00		59.679.288.000,00		59.679.288.000,00		59.679.288.000,00		59.679.288.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	9	160	59.679.288.000,00	160	59.679.288.000,00	160	59.679.288.000,00	160	59.679.288.000,00	160	59.679.288.000,00		
1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				32.400.000.000,00		32.400.000.000,00		32.400.000.000,00		32.400.000.000,00		32.400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	120	32.400.000.000,00	120	32.400.000.000,00	120	32.400.000.000,00	120	32.400.000.000,00	120	32.400.000.000,00		
1.01.02.1.01.0027 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00		
1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.650.000.000,00		
1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				30.200.000.000,00		30.200.000.000,00		30.200.000.000,00		30.200.000.000,00		30.200.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	120	30.200.000.000,00	120	30.200.000.000,00	120	30.200.000.000,00	120	30.200.000.000,00	120	30.200.000.000,00		
1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah				51.200.000.000,00		51.200.000.000,00		51.200.000.000,00		51.200.000.000,00		51.200.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	35	400	51.200.000.000,00	400	51.200.000.000,00	400	51.200.000.000,00	400	51.200.000.000,00	400	51.200.000.000,00		
1.01.02.1.01.0037 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.01.0038 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.1.01.0040 - Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.1.01.0043 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				378.000.000.000,00		378.000.000.000,00		378.000.000.000,00		378.000.000.000,00		378.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	246	267	378.000.000.000,00	267	378.000.000.000,00	267	378.000.000.000,00	267	378.000.000.000,00	267	378.000.000.000,00		
1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	246	246	300.000.000,00	246	300.000.000,00	246	300.000.000,00	246	300.000.000,00	246	300.000.000,00		
1.01.02.1.01.0064 - Penyediaan infrastruktur TIK				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	(Paket)														
1.01.02.1.01.0067 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	7	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			
Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
1.01.02.1.01.0070 - Pembangunan Ruang Laboratorium				20.500.000.000,00		20.500.000.000,00		20.500.000.000,00		20.750.000.000,00		20.750.000.000,00			
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	82	20.500.000.000,00	82	20.500.000.000,00	82	20.500.000.000,00	83	20.750.000.000,00	83	20.750.000.000,00			
1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				2.850.000.000,00		2.850.000.000,00		2.850.000.000,00		2.850.000.000,00		2.850.000.000,00			
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	19	2.850.000.000,00	19	2.850.000.000,00	19	2.850.000.000,00	19	2.850.000.000,00	19	2.850.000.000,00			
1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				43.250.000.000,00		43.250.000.000,00		43.250.000.000,00		43.250.000.000,00		43.250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	26	134	43.250.000.000,00	134	43.250.000.000,00	134	43.250.000.000,00	134	43.250.000.000,00	134	43.250.000.000,00		
1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.1.01.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
1.01.02.1.01.0077 - Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
Meningkatnya dukungan Kepada Anak Usia Sekolah Pendidikan Menengah yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	5.900.000.000,00	1	5.900.000.000,00	1	5.900.000.000,00	1	5.900.000.000,00	1	5.900.000.000,00		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	2.700		2.700		2.700		2.700		2.700			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	3.092	500		500		500		500		500			
1.01.02.1.01.0039 - Pengadaan Perlengkapan				4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peserta Didik															
Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	2.700	4.400.000.000,00	2.700	4.400.000.000,00	2.700	4.400.000.000,00	2.700	4.400.000.000,00	2.700	4.400.000.000,00			
1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00			
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	3.092	500	1.200.000.000,00	500	1.200.000.000,00	500	1.200.000.000,00	500	1.200.000.000,00	500	1.200.000.000,00			
1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
Meningkatnya Kemampuan Literasi/Numerasi Peserta Didik SMA	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	251	60.010.000.000,00	251	60.010.000.000,00	251	60.010.000.000,00	251	60.010.000.000,00	251	60.010.000.000,00			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	0	1.334		1.334		1.334		1.334		1.334		1.334		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)														
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	40	251		251		251		251		251		251		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	0	500		500		500		500		500		500		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	251		251		251		251		251		251		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	300		300		300		300		300		300		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	251		251		251		251		251		251		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	251		251		251		251		251		251		
1.01.02.1.01.0041 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00			
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00			
1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00			
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	300	360.000.000,00	300	360.000.000,00	300	360.000.000,00	300	360.000.000,00	300	360.000.000,00			
1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00			
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	0	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00			
1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	40	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00		
1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00		
1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20.300.000.000,00		20.300.000.000,00		20.300.000.000,00		20.300.000.000,00		20.300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	1.334	20.300.000.000,00	1.334	20.300.000.000,00	1.334	20.300.000.000,00	1.334	20.300.000.000,00	1.334	20.300.000.000,00		
1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				15.300.000.000,00		15.300.000.000,00		15.300.000.000,00		15.300.000.000,00		15.300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	1.000	15.300.000.000,00	1.000	15.300.000.000,00	1.000	15.300.000.000,00	1.000	15.300.000.000,00	1.000	15.300.000.000,00		
1.01.02.1.01.0063 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00		
1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00		
1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00	251	300.000.000,00		
Menurunnya terjadinya perundungan, kekerasan dan intoleransi pada satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
1.01.02.1.01.0061 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				458.260.000.000,00		458.360.000.000,00		458.010.000.000,00		457.510.000.000,00		457.360.000.000,00			
Meningkatnya Daya Tampung Peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	379.860.000.000,00	1	379.960.000.000,00	1	379.610.000.000,00	1	379.110.000.000,00	1	378.960.000.000,00			
1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	0	182		182		182		182		182				
Sekolah Baru yang Terbangun															
1.01.02.1.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	185	180		180		180		180		180				
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	8		8		8		8		8				
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	37	30		30		30		30		30				
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	7		7		7		8		8				
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Dibangun (Ruang)														
	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	0	14		14		15		15		15				
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	20		20		20		20		20				
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	14		14		14		14		14				
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	6		6		6		6		6				
	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	2		2		2		2		3				
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	10		10		10		10		11				
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	7		7		7		7		8				
	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	23	300		300		300		300		300				
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10		10		10		10		10				
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	6		6		6		6		6				
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10		10		10		10		10				
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	6		6		6		6		6				
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	10		10		10		10		10				
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1				
				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00			
				1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00			
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00			
1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa				3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.750.000.000,00		3.750.000.000,00		3.750.000.000,00			
Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	0	14	3.500.000.000,00	14	3.500.000.000,00	15	3.750.000.000,00	15	3.750.000.000,00	15	3.750.000.000,00			
1.01.02.1.02.0005 - Pembangunan Ruang Laboratorium				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0006 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	8	2.000.000.000,00	8	2.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0007 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		2.000.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	8	2.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0008 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0009 - Pembangunan Asrama Sekolah				50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	10	50.000.000.000,00	10	50.000.000.000,00	10	50.000.000.000,00	10	50.000.000.000,00	10	50.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				47.500.000.000,00		47.600.000.000,00		46.990.000.000,00		45.600.000.000,00		44.600.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	37	30	47.500.000.000,00	30	47.600.000.000,00	30	46.990.000.000,00	30	45.600.000.000,00	30	44.600.000.000,00		
1.01.02.1.02.0011 - Pembangunan Fasilitas Parkir				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.02.0012 - Pembangunan Kantin Sekolah				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00		
1.01.02.1.02.0016 - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	450.000.000,00		
1.01.02.1.02.0018 - Rehabilitasi Ruang Laboratorium				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.1.02.0019 - Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah				30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	23	300	30.000.000.000,00	300	30.000.000.000,00	300	30.000.000.000,00	300	30.000.000.000,00	300	30.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0029 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.1.02.0030 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedia (Paket)													
1.01.02.1.02.0032 - Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (Unit)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.1.02.0035 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				260.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00		
1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				217.500.000.000,00		217.500.000.000,00		217.500.000.000,00		218.140.000.000,00		218.440.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	185	180	217.500.000.000,00	180	217.500.000.000,00	180	217.500.000.000,00	180	218.140.000.000,00	180	218.440.000.000,00		
1.01.02.1.02.0047 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	0	182	200.000.000,00	182	200.000.000,00	182	200.000.000,00	182	200.000.000,00	182	200.000.000,00		
1.01.02.1.02.0058 - Penyediaan infrastruktur TIK				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0062 - Rehabilitasi sedang/berat				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00			
1.01.02.1.02.0064 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00			
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00			
1.01.02.1.02.0065 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
1.01.02.1.02.0066 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
1.01.02.1.02.0067 - Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00			
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00			
1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00			
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	14	2.100.000.000,00	14	2.100.000.000,00	14	2.100.000.000,00	14	2.100.000.000,00	14	2.100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.02.0070 - Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0071 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.1.02.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.1.02.0075 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	11	1.650.000.000,00		
Meningkatnya dukungan Kepada Anak Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	3.720.000.000,00	1	3.720.000.000,00	1	3.720.000.000,00	1	3.720.000.000,00	1	3.720.000.000,00		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	3.350	300		300		300		300		300				
1.01.02.1.02.0031 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00			
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1.600	2.700.000.000,00	1.600	2.700.000.000,00	1.600	2.700.000.000,00	1.600	2.700.000.000,00	1.600	2.700.000.000,00			
1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00			
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	3.350	300	720.000.000,00	300	720.000.000,00	300	720.000.000,00	300	720.000.000,00	300	720.000.000,00			
1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Lulusan SMK	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	112	183	500.000.000,00	183	500.000.000,00	183	500.000.000,00	183	500.000.000,00	183	500.000.000,00			
	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	183		183		183		183		183				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	112	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00		
1.01.02.1.02.0056 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00		
Meningkatnya Kejuasaan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	10	52.000.000.000,00	10	52.000.000.000,00	10	52.000.000.000,00	10	52.000.000.000,00	10	52.000.000.000,00		
	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	0	16.000		16.000		16.000		16.000					
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	145	183		183		183		183					
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	100		100		100		100					
1.01.02.1.02.0033 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	100	50.000.000.000,00	100	50.000.000.000,00	100	50.000.000.000,00	100	50.000.000.000,00	100	50.000.000.000,00		
1.01.02.1.02.0060 - Fasilitasi Sertifikasi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Kompetensi Peserta Didik															
Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	0	16.000	250.000.000,00	16.000	250.000.000,00	16.000	250.000.000,00	16.000	250.000.000,00	16.000	250.000.000,00			
1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00			
Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00			
1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	145	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00			
Meningkatnya Kemampuan Literasi/Numerasi Peserta Didik SMK	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	183	21.680.000.000,00	183	21.680.000.000,00	183	21.680.000.000,00	183	21.680.000.000,00	183	21.680.000.000,00			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	330	183		183		183		183		183				
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	0	500		500		500		500		500				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Menengah Kejuruan (Orang)														
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	183		183		183		183		183		183		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5	5		5		5		5		5		5		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	183		183		183		183		183		183		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	12	90		90		90		90		90		90		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	183		183		183		183		183		183		
1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00			
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	12	90	380.000.000,00	90	380.000.000,00	90	380.000.000,00	90	380.000.000,00	90	380.000.000,00			
1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan				20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan															
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	0	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00	500	20.000.000.000,00			
1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	330	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00			
1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00			
1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
dikembangkan	telah dikembangkan (Konten Digital)														
1.01.02.1.02.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00			
1.01.02.1.02.0057 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00			
1.01.02.1.02.0072 - Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00	183	250.000.000,00			
Menurunnya perundungan, kekerasan dan intoleransi pada satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1						
1.01.02.1.02.0054 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Bidang Pendidikan															
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			
1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			
1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus				45.240.000.000,00		45.390.000.000,00		45.390.000.000,00		45.390.000.000,00		45.390.000.000,00			
Meningkatnya Daya Tampung Peserta Didik pada Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	26.540.000.000,00	1	26.690.000.000,00	1	26.690.000.000,00	1	26.690.000.000,00	1	26.690.000.000,00			
	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	0	3		3		3		3		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)													
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	0	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)														
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	24	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (Orang)	0	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	15		15		15		15		15		15		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00		
1.01.02.1.03.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.01.02.1.03.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.1.03.0006 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.1.03.0007 - Pembangunan Asrama Sekolah				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.1.03.0009 - Pembangunan Fasilitas Parkir				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.1.03.0010 - Pembangunan Kantin Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.1.03.0014 - Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.1.03.0015 - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.1.03.0016 - Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.1.03.0017 - Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.1.03.0029 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	15	1.500.000.000,00	15	1.500.000.000,00	15	1.500.000.000,00	15	1.500.000.000,00	15	1.500.000.000,00		
1.01.02.1.03.0036 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia (Paket)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.1.03.0037 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.1.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				9.650.000.000,00		9.650.000.000,00		9.650.000.000,00		9.650.000.000,00		9.650.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	24	24	9.650.000.000,00	24	9.650.000.000,00	24	9.650.000.000,00	24	9.650.000.000,00	24	9.650.000.000,00		
1.01.02.1.03.0053 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (Orang)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0063 - Penyediaan infrastruktur TIK				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0068 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00		
1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	0	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00	7	1.750.000.000,00		
1.01.02.1.03.0074 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.1.03.0075 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0076 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.1.03.0077 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.03.0078 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.1.03.0079 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	0	7	1.050.000.000,00	7	1.050.000.000,00	7	1.050.000.000,00	7	1.050.000.000,00	7	1.050.000.000,00		
1.01.02.1.03.0080 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				450.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	3	450.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
Meningkatnya dukungan Kepada Anak Usia Sekolah Pendidikan Khusus yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	7.650.000.000,00	1	7.650.000.000,00	1	7.650.000.000,00	1	7.650.000.000,00	1	7.650.000.000,00		
	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	484	25		25		25		25					
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	500		500		500		500					
1.01.02.1.03.0038 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	500	2.150.000.000,00	500	2.150.000.000,00	500	2.150.000.000,00	500	2.150.000.000,00	500	2.150.000.000,00		
1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	484	25	5.400.000.000,00	25	5.400.000.000,00	25	5.400.000.000,00	25	5.400.000.000,00	25	5.400.000.000,00		
1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan Literasi/Numerasi Peserta Didik SDLB, SMPLB dan SMALB	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	30	10.850.000.000,00	30	10.850.000.000,00	30	10.850.000.000,00	30	10.850.000.000,00	30	10.850.000.000,00		
	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	24		24		24		24		24			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	24		24		24		24		24			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang	0	24		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	dilaksanakan (Orang)														
	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	0	500		500		500		500		500		500		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	0	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	71	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	5		5		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	(Konten Digital)														
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	24		24		24		24		24		24		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	5		5		5		5		5		5		
1.01.02.1.03.0040 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00			
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00	5	2.500.000.000,00			
1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00			
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00			
1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00			
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	0	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00			
1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	71	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0056 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0057 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.01.02.1.03.0058 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0062 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0065 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	0	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.02.1.03.0081 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Kependidikan															
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00			
Menurunnya terjadinya perundungan, kekerasan dan intoleransi pada satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
1.01.02.1.03.0060 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				2.930.000.000,00		2.930.000.000,00		2.930.000.000,00		2.930.000.000,00		2.930.000.000,00		
Terakomodirnya muatan lokal dalam kurikulum sekolah	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	2.930.000.000,00	100	2.930.000.000,00	100	2.930.000.000,00	100	2.930.000.000,00	100	2.930.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pendidikan	
1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		
Terwujudnya Pembelajaran Muatan Lokal dalam Kurikulum Sekolah pada SMA dan SMK	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun (Dokumen)	0	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00		
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	50	50	50	50								
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	0	1	1	1	1								
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia (Buku)	0	400	400	400	400								
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	0	7	7	7	7								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.03.1.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia (Buku)	0	400	400.000.000,00	400	400.000.000,00	400	400.000.000,00	400	400.000.000,00	400	400.000.000,00		
1.01.03.1.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	50	550.000.000,00	50	550.000.000,00	50	550.000.000,00	50	550.000.000,00	50	550.000.000,00		
1.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	0	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00		
1.01.03.1.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.03.1.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.03.1.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus				730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		
Terwujudnya Pembelajaran Muatan Lokal dalam Kurikulum Sekolah pada Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	24	730.000.000,00	24	730.000.000,00	24	730.000.000,00	24	730.000.000,00	24	730.000.000,00		
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	0	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia (Buku)	0	130		130		130		130		130			
1.01.03.1.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.03.1.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia (Buku)	0	130	130.000.000,00	130	130.000.000,00	130	130.000.000,00	130	130.000.000,00	130	130.000.000,00		
1.01.03.1.02.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.01.03.1.02.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	0	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
dinilai/ditelaah	yang telah dinilai/ditelaah (Buku)														
1.01.03.1.02.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			
1.01.03.1.02.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru SLB (Indeks)	1,0	1,0	600.000.000,00	1,0	600.000.000,00	1,0	600.000.000,00	1,0	600.000.000,00	1,0	600.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan		
	Indeks Distribusi Guru SMK (Indeks)	0,81	0,82		0,83		0,84		0,85						
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	71	72		73		74		75						
	Indeks Distribusi Guru SMA (Indeks)	0,67	0,72		0,74		0,76		0,78		0,80				
1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya perhitungan, pemetaan dan pendistribusian bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan untuk pemerataan layanan pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Menengah dan Pendidikan Khusus	Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)														
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00			
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan		
1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00			
Terwujudnya Izin Operasional Sekolah pada SMA dan SMK untuk pemerataan layanan pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	6	230.000.000,00	6	230.000.000,00	6	230.000.000,00	6	230.000.000,00	6	230.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	6		6		6		6		6				
1.01.05.1.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00			
Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan	0	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
oleh Masyarakat Terverifikasi	Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)														
1.01.05.1.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00			
1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00			
Terwujudnya Izin Operasional Sekolah pada Pendidikan Khusus untuk pemerataan layanan pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	3	140.000.000,00	3	140.000.000,00	3	140.000.000,00	3	140.000.000,00	3	140.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	3		3		3		3		3				
1.01.05.1.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat															
Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00			
1.01.05.1.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00			
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	3	95.000.000,00	3	95.000.000,00	3	95.000.000,00	3	95.000.000,00	3	95.000.000,00			
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			
terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Kewenangan Provinsi (%)	20	40	600.000.000,00	60	600.000.000,00	70	600.000.000,00	90	600.000.000,00	100	600.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pendidikan		
1.01.06.1.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra pada Satuan pendidikan untuk kelestarian bahasa dan sastra daerah	Jumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendukung upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup provinsi. (Dokumen)	0	0	600.000.000,00	0	600.000.000,00	1	600.000.000,00	0	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi (Orang)	0	86		87		43		87		43			
	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media)	0	0		0		1		0		1			
1.01.06.1.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.06.1.01.0008 - Fasilitasi media publik berbahasa daerah				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
1.01.06.1.01.0011 - Penyusunan Kebijakan Strategis				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terprogramnya kegiatan utama pelestarian bahasa daerah dan terumuskannya kebijakan strategis, baik berupa peraturan perundangan-undangan (regulasi) dan/atau kebijakan program terkait pelestarian bahasa daerah di wilayah provinsi.	Jumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendukung upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup provinsi. (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
1.01.06.1.01.0013 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi				300.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		
Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di provinsi	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi (Orang)	0	86	300.000.000,00	87	300.000.000,00	43	100.000.000,00	87	300.000.000,00	43	100.000.000,00		

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Dinas Pendidikan memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis di sektor pendidikan diantaranya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi yang masih menghadapi tantangan signifikan terutama dalam aspek pendidikan dan ketenagakerjaan. Untuk mengahadapinya di perlukan subkegiatan yang dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi yaitu meningkatnya karakter sumber daya manusia. Berikut adalah Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 14. Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
			1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0039 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Program Jaringan majukan Jambi (Pro-Jambi Cerdas) dan SPM Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0041 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0043 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Program Jaringan majukan Jambi (Pro-Jambi Cerdas) dan SPM Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Menengah Atas	
			1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0058 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0061 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0063 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0031 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Program Jaringan majukan Jambi (Pro-Jambi Cerdas) dan SPM Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0033 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0035 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Program Jaringan majukan Jambi (Pro-Jambi Cerdas) dan SPM Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0051 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0054 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0056 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0057 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0058 - Penyediaan infrastruktur TIK	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0060 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0062 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0064 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0072 - Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
			1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0038 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Program Jaringan majukan Jambi (Pro-Jambi Cerdas) dan SPM Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0040 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Program Jaringan majukan Jambi (Pro-Jambi Cerdas) dan SPM Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0056 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0057 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0058 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0063 - Penyediaan infrastruktur TIK	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0079 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.02.1.03.0081 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
2.	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
			1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
			1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel 14 di atas menggambarkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dan subkegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dirancang untuk mendukung pencapaian outcome strategis di sektor pendidikan. Setiap subkegiatan memiliki peran yang spesifik dalam menjawab isu-isu utama diantaranya dimulai akses pendidikan berkualitas masih belum merata. Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2025-2029 yaitu melalui Program Jaringan

Memajukan Jambi (Pro-Jambi) melalui sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus berupa pemberian biaya pendidikan dan perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu. Adapun target pemberian bantuan pendidikan dan perlengkapan peserta didik direncanakan sebagai berikut :

Tabel 15. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/ Perengkapan Peserta Didik

Tingkat Pendidikan	Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Perlengkapan Peserta Didik					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SMA	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SMK	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SLB	500	500	500	500	500	500

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Selain akses pendidikan berkualitas yang belum merata, isu kualitas layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan berupa kompetensi dasar peserta didik, karakter peserta didik, lingkungan belajar, proses pembelajaran dan pendidikan vokasi SMK belum sepenuhnya selaras dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Melalui identifikasi dan refleksi capaian pada Rapor Pendidikan merupakan langkah penting dalam memahami kondisi satuan pendidikan secara menyeluruh. Proses ini mencakup analisis permasalahan kemampuan literasi, numerasi, pembentukan karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan, hingga penyerapan lulusan dan keselarasan dengan dunia kerja. Melalui perencanaan berbasis data dengan sub kegiatan prioritas SPM diatas, tentunya akan dapat melakukan pembenahan masalah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan efisiensi anggaran. Disamping itu perlunya penguatan tata kelola untuk pendidik dan tenaga kependidikan berupa distribusi guru dan Peningkatan kompetensi Guru.

Dengan demikian, Tabel 15. menegaskan pentingnya perencanaan subkegiatan yang strategis, terukur, dan berorientasi hasil untuk memastikan bahwa program-program pendidikan benar-benar mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut dapat ditabulasikan indikator-indikator sebagai alat ukur terhadap capaian pembangunan pendidikan dalam jangka menengah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 16. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tabel 4.5)

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Rata-rata lama sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	9,38-9,40	9,50	9,60	9,76	9,86-9,89	9,93
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat kompetensi lulusan SMK (Rata-rata persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian dan persentase kepuasan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja terhadap lulusan yang bekerja)	Persen	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29	67,79
4	Persentase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional	Persen	79,96	81,29	82,63	83,96	85,30	86,64

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Persetase satuan pendidikan SMA dan SMK yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional	Persen	82,63	83,96	85,30	86,64	87,97	89,31
6	Persetase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi Berdasarkan asesmen nasional	Persen	34,72	40,28	45,83	51,39	56,94	62,50
7	Persetase satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi Berdasarkan asesmen nasional	Persen	43,06	48,61	54,17	59,72	65,28	70,83

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 16 di atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam Renstra 2025–2029 menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan akses dan kualitas hasil pembelajaran. Indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat Indikator partisipasi pendidikan (APS) pada anak

usia 16–18 tahun ditargetkan meningkat dari tahun 2026 hingga tahun 2030, menandakan upaya serius dalam meningkatnya akses pendidikan. Sementara itu, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi baik pada satuan pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus juga menjadi fokus utama untuk mencapai standar kompetensi minimum sehingga terwujudnya kualitas hasil pembelajaran.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan menggunakan IKK, Dinas Pendidikan dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 17. Indikator Kinerja Kunci, Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

(Tabel 4.6)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	positif	%	71,97	72,31	72,65	72,99	73,33	73,67	74,01	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	positif	%	59,78	67,82	75,87	76,96	78,05	79,14	80,23	
4.	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	positif	%	81,60	83,66	85,72	87,77	89,83	91,89	93,95	
5.	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	positif	%	74,48	75,02	75,94	76,86	77,78	78,70	80,00	
6.	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	70,10	70,70	71,30	71,90	72,50	73,10	73,70	
7.	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	64,73	66,03	67,33	68,63	69,93	71,23	72,53	
8.	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	60,42	62,02	63,62	65,22	66,82	68,42	70,02	
9.	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	55,53	56,03	56,53	57,03	57,53	58,03	58,53	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	57,69	58,19	58,69	59,19	59,69	60,19	60,69	
11.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	60,05	61,65	63,25	64,85	66,45	68,05	69,65	
12.	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	56,19	58,39	60,59	62,79	64,99	67,19	69,39	
13.	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	54,07	54,67	55,27	55,87	56,47	57,07	57,67	
14.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	53,55	53,80	54,05	54,30	54,55	54,80	55,05	
15.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	57,91	58,41	58,91	59,41	59,91	60,41	60,91	
16.	Iklm Inklusivitas SMA	positif	Nilai	58,85	60,35	61,85	63,35	64,85	66,35	67,85	
17.	Iklm Inklusivitas SMK	positif	Nilai	55,33	57,63	59,93	62,23	64,53	66,83	69,13	
18.	Iklm Inklusivitas SDLB		Nilai	64,31	65,61	66,91	68,21	69,51	70,81	72,11	
19.	Iklm inklusivitas SMPLB	positif	Nilai	62,62	64,02	65,42	66,82	68,22	69,62	71,02	
20.	Iklm inklusivitas SMALB	positif	Nilai	63,18	64,78	66,38	67,98	69,58	71,18	72,78	
21.	Iklm keamanan SMA	positif	Nilai	70,95	80,05	81,25	82,45	83,65	84,85	86,05	
22.	Iklm keamanan SMK	positif	Nilai	67,46	68,66	69,86	71,06	72,26	73,46	74,66	
23.	Iklm keamanan SDLB	positif	Nilai	74,38	74,88	75,38	75,88	76,38	76,88	77,38	
24.	Iklm keamanan SMPLB	positif	Nilai	64,08	65,28	66,48	67,68	68,88	70,08	71,28	
25.	Iklm keamanan SMALB	positif	Nilai	69,18	70,48	71,78	73,08	74,39	75,68	76,98	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.	Iklm kebinekaan SMA	positif	Nilai	71,08	72,08	73,08	74,08	75,08	76,08	77,08	
27.	Iklm kebinekaan SMK	positif	Nilai	68,65	69,95	71,25	72,55	73,85	75,15	76,45	
28.	Iklm kebinekaan SDLB	positif	Nilai	65,23	66,23	67,23	68,23	69,23	70,23	71,23	
29.	Iklm kebinekaan SMPLB	positif	Nilai	66,62	68,42	70,22	72,02	73,82	75,62	77,42	
30.	Iklm kebinekaan SMALB	positif	Nilai	68,82	70,82	72,82	74,82	76,82	78,82	80,82	
31.	Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan (TIKP) oleh satuan pendidikan	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis di bidang pendidikan, potensi daerah, serta permasalahan aktual yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

5.1 Kesimpulan Substansial

Pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Jambi adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun daerah dan bangsa secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kualitas belajar mengajar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata dalam kesempatan pendidikan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan dalam kurun waktu berjalan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan pendidikan harus berbasis pada data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk identifikasi kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, seperti satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional bidang pendidikan.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan SMA, SMK dan SLB, penguatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pendidikan.
- c. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lainnya, dunia usaha, pemerintah desa, maupun masyarakat, menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Sinergi ini memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kaidah-kaidah ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.

2. Partisipatif

Penyelenggaraan program pendidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, orang tua, peserta didik, masyarakat, serta mitra strategis lainnya, untuk memastikan kebijakan dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, akses layanan, dan pemerataan hasil belajar.

4. Keadilan Sosial

Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah terpencil.

5. Berkelanjutan

Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan SDM pendidikan, serta daya dukung sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkomitmen untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain :

a. Monitoring Berkala

Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Pendidikan bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.

b. Evaluasi Kinerja Tahunan

Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Melalui forum-forum seperti musyawarah pendidikan, pengaduan publik, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pendidikan, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi aktif.

Selain itu juga evaluasi kincerja Dinas Pendidikan juga melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Informasi Republik Indonesia Provinsi Jambi, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, dan berbagai lembaga pemangku kepentingan yang terkait.

d. Audit Internal dan Eksternal

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas anggaran, serta pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan pendidikan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Dinas Pendidikan. Akhir kata, pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif.